



LAPORAN 1 TRIWULAN 2022



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2022	6
II. Progres dan Capaian	11
1. Progres Proyek	12
A. Coremap–CTI World Bank	12
B. Coremap–CTI Asian Development Bank	35
C. Blended Finance	62
D. Blue Carbon	66
2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (<i>Fundraising</i>)	69
2.1 FGD Pembahasan Potensi Wisata Bahari Kawasan Marine Protected Area	69
2.2 Undangan ADB pada Healthy Oceans Tech and Finance Forum	70
2.3 Diskusi dengan University of Rhode Island (URI)	71
2.4 Rapat Coral Transplantation dengan PT. Indo Raya Tenaga	72
2.5 Undangan KKP: Rapat Penyusunan Dokumen Readiness Criteria INSAN TERANG LAUTRA	73
2.6 Undangan Kemenkomarves: Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Global Blended Finance Alliance dan Climate Action Initiative	75
2.7 Undangan Forest Watch Indonesia: Diskusi Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Skema IKN	76
2.8 Undangan BRIN: Rapat Koordinasi Proposal Rencana Pemetaan Lamun di Indonesia	77
2.9 Wrap Up Meeting CPRR	78
2.10 Undangan Rapat dengan CoWater Consulting	79
3. Komunikasi, Outreach dan Kemitraan	80
3.1 Media Sosial	80
3.2 Produksi Media	87
3.3 Media Monitoring	90
III. Audit, Keuangan dan Operasional	94
1. Laporan Audit Tahun 2022	94
2. Informasi Keuangan Periode Januari - Maret 2022	99
3. Operasional / Kesekretariatan	95



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Saat ini ICCTF sedang mengimplementasikan proyek hibah COREMAP – CTI World bank (WB)

yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Kegiatan utama yang dicapai pada periode ini meliputi pembangunan infrastruktur menara pengawas, pusat informasi ekowisata, pusat monitoring Cetacea dan karamba jaring apung. Progress pembangunan infrastruktur tersebut sebagian besar sudah selesai dan beberapa masih dalam proses pembangunan, serta dalam proses penyerahan kepada *stakeholder* setempat. Pada periode ini juga telah dilaksanakan kegiatan diseminasi dan exit strategy, serta pemeriksaan asset proyek COREMAP-CTI WB.

ICCTF juga sudah mengimplementasikan seluruh kegiatan COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan oleh Konsultan Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada periode ini kegiatan yang dicapai adalah survei dan identifikasi ekosistem di lokasi *project*, identifikasi potensi sumber daya perikanan di lokasi *project*, serta pelatihan untuk Pokmaswas. Selain itu telah

dilaksanakan monitoring dan penyulaman ulang mangrove yang terkena gelombang. Progress pembangunan infrastruktur masih dalam proses penyusunan DED. Empat mahasiswa telah berada di Brisbane, Australia

Pada periode ini kegiatan *Blended Finance* melanjutkan konsolidasi dengan World Bank dan Asian Development Bank.

Kegiatan *Blue Carbon* pada periode ini berupa diskusi dengan AFD terkait Facility 2050 dan kunjungan lapang ke Likupang Manado

Penggalangan dana lainnya juga mulai dilakukan yaitu terkait *Marine Tourism*. Selain itu

pembahasan tentang potensi dukungan pendanaan lain masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersama-sama dengan Mitra Pelaksana. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selanjutnya tim komunikasi ICCTF melakukan analisis media sosial setiap akhir bulan guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.

A decorative graphic consisting of a large circle at the top, a thin line connecting it to a smaller circle below, and a large 'X' shape below that. To the right of the 'X' is another large circle, similar to the one at the top.

1

RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2022

Q1

JAN – MAR

Pengelolaan Proyek

- Monev dan *spotcheck* Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan beasiswa *master degree* COREMAP–CTI ADB
- Pemeriksaan Asset COREMAP-CTI WB

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek Blue Finance ADB

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan sponsorship
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik
- Distribusi kalender ICCTF 2022

Dukungan Operasional

- Exit Strategy
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal I ICCTF 2022

Q2
APR – JUN

Pengelolaan Proyek

- Monitoring lapangan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Studi bioekonomi Tuna, Kakap Merah dan rumput laut di Lesser Sunda

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek Blue Finance

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

Dukungan Operasional ICCTF

- Audit BPK
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal II ICCTF 2022

Q3
JUL - SEP

Pengelolaan Proyek

- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

Penggalangan Dana

- Persiapan proyek Blue Finance

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

Dukungan Operasional ICCTF

- Workshop Koordinasi Kuartal III ICCTF 2022

Q4
OCT - DEC

Pengelolaan Proyek

- *Programmatic and Finance Monitoring*
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi dan pelaporan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

Penggalangan Dana

- Implementasi Proyek Blue Finance

Komunikasi

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan media elektronik
- Produksi Kalender ICCTF 2023

Dukungan Operasional ICCTF

- Workshop Koordinasi Kuartal IV ICCTF 2022



2

PROGRES dan
CAPAIAN

1 | PROGRESS PROYEK

A. COREMAP-CTI World Bank



Kegiatan PIU COREMAP - CTI World Bank

a. Pembahasan Proses Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah ke Penerima Manfaat

Pada tanggal 18 Januari 2022 telah dilaksanakan kegiatan Pembahasan Proses Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah ke Penerima Manfaat COREMAP-CTI World Bank (WB) di Hotel Hermitage – Jakarta. Pada pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk dari Aset yang diserahkan ke masyarakat adalah bentuk bantuan perintah dalam bentuk tunai sehingga tidak masuk dalam Neraca aset Bappenas, pencatatan dan dokumen terkait pengadaan barang adalah untuk pencatatan internal dan managerial sebagai bentuk kelengkapan dokumen.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan segera dibentuk tim dari Bappenas, PPK, Kemenkeu dan ICCTF untuk pemeriksaan asset, diharapkan mitra pelaksana dapat menjaga keberadaan asset yang akan diperiksa.



Gambar 1.A.1 Diskusi pembahasan serah terima barang

b. Rapat Penelitian Administrasi dan Persiapan Pemeriksaan Fisik Barang Proyek COREMAP-CTI WB

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2022 bertempat di Hotel Fraser Palace, Jakarta. Agenda pada pertemuan ini adalah pembahasan penelitian administrasi dan persiapan pemeriksaan fisik barang pada proyek COREMAP-CTI WB. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Pertemuan hari ini adalah penyampaian berita acara penelitian administrasi.
- Pemeriksaan ini hanya masuk ke dalam laporan operasional (beban) dan tidak masuk kedalam LK Bappenas. Laporan ini dilakukan untuk tertib secara manajerial.
- Terkait dengan barang atau hasil hibah sebaiknya sudah disusun kedalam daftar untuk mempermudah pengecekan saat di lapangan maupun saat administrasi
- Seluruh mitra diharapkan dapat memperbaiki dan melengkapi dokumen berdasarkan masukan-masukan yang telah disampaikan pada hari ini
- Terkait rencana pemeriksaan fisik ke depan, untuk lokasi yang memakai transportasi laut perlu dipastikan kembali apakah kondisinya memungkinkan pada saat pemeriksaan fisik nanti.
- Jika ada lokasi yang benar-benar tidak bisa dikunjungi, diusulkan melalui SPTJM
- Untuk jadwal pemeriksaan fisik, sebaiknya melihat juga perkembangan situasi pandemi dan arahan dari Pak Sesmen.

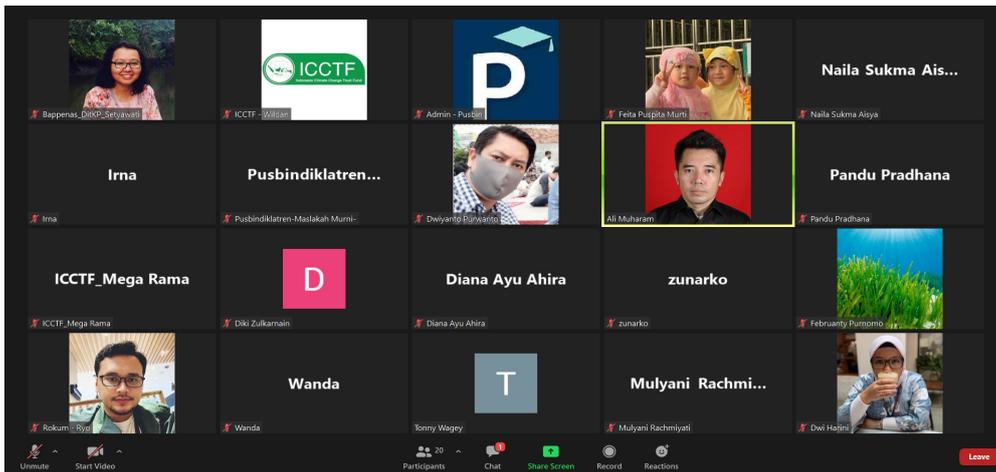


Gambar 1.A.2 Pembukaan acara oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas

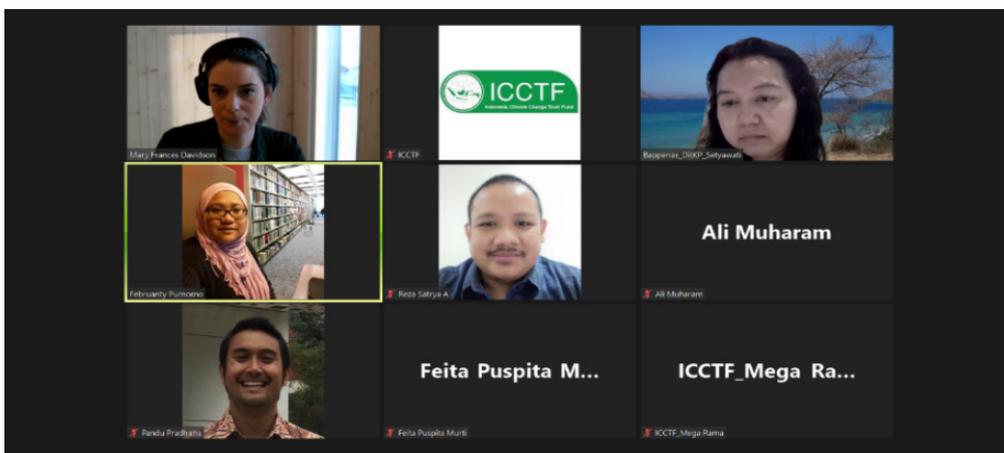
c. Persiapan Pelatihan COREMAP-CTI Tahun 2022 di Islandia

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah pembahasan persiapan pelatihan COREMAP-CTI di Islandia. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- ICCTF sudah menyiapkan RAB dengan jumlah anggaran sebesar USD 160.000 untuk 8 hari dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang.
- Kegiatan direncanakan pada tanggal 19 – 27 Mei 2022, sehabis lebaran.
- Perlu kehati-hatian karena waktunya dekat dengan loan closing date di Bulan Juni.
- ICCTF akan melakukan klarifikasi dengan GRO dalam waktu dekat.
- Pusbindiklatren akan berdiskusi dengan WB untuk memastikan kebutuhan dokumen yang diperlukan MoU atau CA.



Gambar 1.A.3 Diskusi persiapan pelatihan COREMAP-CTI di Islandia



Gambar 1.A.4 Diskusi dengan pihak GRO-FTP terkait rancana pelatihan di Islandia

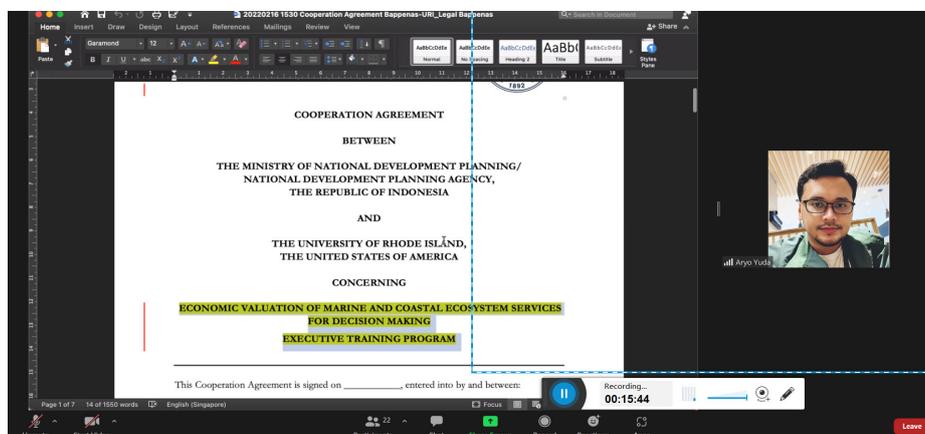
Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan Pusbindiklatren, pada tanggal 16 Februari 2022, ICCTF melaksanakan pertemuan dengan GRO-FTP dengan agenda kegiatan pembahasan lanjutan rencana pelatihan di Islandia. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Tidak ada komentar signifikan pada ToR (jadwal dan substansi).
- Sumber pendanaan GRO adalah Pemerintah Islandia dan berkegiatan di bawah regulasi Pemerintah Islandia. GRO adalah entitas independent dan tidak perlu mengikuti peraturan UN.
- GRO-FTP diselenggarakan oleh Marine and Fresh Water Research Institute of Iceland.
- Jika perlu membuat MoU, mungkin dapat dibuat komitmen terhadap program selama 3-5 tahun untuk train fellows dari Indonesia.
- Site visit akan berlokasi di utara Islandia. Materi workshop akan disusun oleh GRO-FTP dan lecturer.

d. Undangan Pusbindiklatren: Rapat Pembahasan CA Pelatihan COREMAP-CTI Tahun 2022 di Rhode Island

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah pembahasan CA pelatihan COREMAP-CTI di Rhode Island. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Terkait Covid di Europe dan United State sudah mulai melonggar, diharapkan Kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, tanpa kendala Kebijakan.
- Skenario dilakukan Secara Luring/Offline di Rhode Island Seperti Tahun 2021 Lalu.
- Jumlah peserta diperkirakan 20 orang.
- Judul dari Pelatihan tidak bisa diganti karena sudah mendapatkan NOL dari WB. Jika mau diubah maka harus mengajukan lagi ke WB dari awal.
- Pelatihan tahun ini lebih spesifik kepada Pengelolaan Pesisir



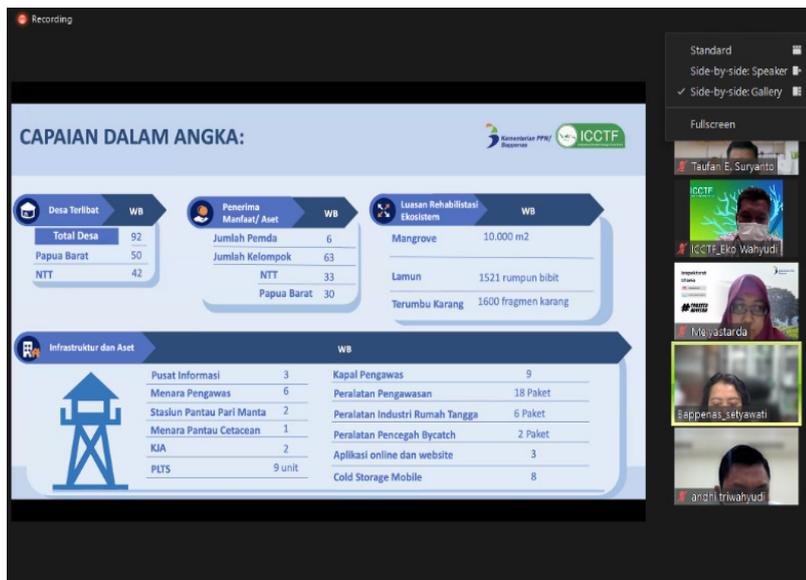
Gambar 1.A.5 Diskusi pembahasan CA pelatihan COREMAP-CTI di Rhode Island

e. Rapat dengan World Bank terkait LAUTRA

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022. Kegiatan rapat ini dilaksanakan secara daring melalui *platform zoom meeting*. Dalam rapat ini pembahasan utama merupakan *blue finance* dalam LAUTRA, dimana diperlukannya tindakan secara tepat terkait implementasi kegiatan yang terdapat di LAUTRA. Pemikiran terkait *blue finance* yang terdapat di LAUTRA tidak lepas hanya dengan konservasi, melainkan diperlukannya juga pengawasan terkait penangkapan ikan. Sehingga dengan kegiatan tersebut diperlukan sejalan dengan *pilot project* yang ada. Terkait dengan *policy notes* yang telah dikirimkan kepada BAPPENAS, sudah mendekati selesai. Sehingga catatan tersebut sudah dapat disebarluaskan.

f. Pemaparan LK Program PHLN COREMAP-CTI World Bank

Kegiatan rapat dilaksanakan pada tanggal 23 maret 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemaparan program PHLN COREMAP-CTI World Bank. Pemaparan ini membahas terkait hasil capaian program COREMAP-CTI World Bank. Dengan bahasan secara detail terkait desa yang terlibat, penerima manfaat/aset, luasan rehabilitasi ekosistem, dan infrastruktur dan aset. Selain itu juga adanya pemaparan terkait hasil serapan dana secara umum pada program COREMAP-CTI WB.



Gambar 1.A.6 Pemaparan Program PHLN COREMAP-CTI World Bank

g. Exit Strategy dan Joint Monitoring

Kegiatan Exit Strategy dan Joint Monitoring dilakukan bersama dengan kegiatan pemeriksaan aset COREMAP-CTI WB. Kegiatan ini dilakukan dengan Bappenas dan K/L terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemda setempat. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu:

1. TNP Laut Sawu

Kegiatan kunjungan lapang ini dilaksanakan pada tanggal 8-11 Maret 2022 dalam rangka Pemantauan dan Pemeriksaan Fisik Aset Proyek COREMAP – CTI World Bank yang ada di TNP Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan pemeriksaan aset:

- a. Total barang hibah proyek COREMAP-CTI yang dilakukan pemeriksaan fisik sejumlah 61 barang
- b. Lokasi barang yang dihibahkan berada pada tiga tempat, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang serta dua desa di Kabupaten Kupang, yaitu Desa Naiketan dan Desa Lifuleo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Penerima hibah yaitu POKDARWIS Karsiba Desa Naiketan, BUMDES Damai, Desa Lifuleo, dan Dewan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah turut serta dalam proses pemeriksaan fisik barang dan turut memastikan bahwa keadaan barang dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan
- d. Mitra pelaksana akan melakukan penempelan label untuk beberapa barang yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dilakukan penyerahan barang
- e. Kondisi barang hibah proyek COREMAP – CTI secara keseluruhan dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan, namun diantara 61 barang tersebut, terdapat 1 buah Bycatch Safety Net Technologies LTD yang tenggelam pada saat pemasangan di jaring.



Gambar 1.A.7 Pemeriksaan Aset COREMAP-CTI WB TNP Laut Sawu

2. Papua Barat

Kegiatan kunjungan lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 24-29 Maret 2022 dalam rangka Workshop Diseminasi Program dan Exit Strategy, serta Pemantauan dan Pemeriksaan Fisik Proyek COREMAP – CTI World Bank di Papua Barat. Kegiatan workshop dimulai dengan pembukaan oleh Dir. Kelautan dan Perikanan Bappenas yang menjelaskan mengenai hubungan RPJMN 2020-2024 dengan pengelolaan pesisir. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai gambaran umum proyek COREMAP-CTI oleh Executive Director ICCTF. Setelah itu setiap mitra memaparkan hasil implementasi dan rencana exit strategy dari kegiatannya masing-masing dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan stakeholders. Sesi tanya jawab dilaksanakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program setelah selesainya COREMAP-CTI World Bank

Hasil dari kegiatan pemantauan dan pemeriksaan asset:

- a. Total barang hibah proyek COREMAP-CTI yang dilakukan pemeriksaan fisik sekitar 815 unit barang serta 5.000 buah bibit mangrove
- b. Lokasi barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tersebar di beberapa lokasi di Wilayah Kabupaten Raja Ampat, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Kampung Sauwandarek
 - b) Kampung Yensawai Barat
 - c) Rumah Produksi Waisai, Distrik Kota Waisai
 - d) Kantor BLUD UPTD KKP Raja Ampat
 - e) Kampung Mutus
 - f) Kampung Meosmanggara
 - g) Pulau Meosarar, Kampung Meosmanggara
 - h) Kampung Harapan Jaya
 - i) Kampung Yellu
 - j) Kampung Tomolol

Barang hasil Proyek COREMAP-CTI World Bank akan diserahkan kepada Penerima Manfaat sebagai berikut:

- a) POKMASWAS Imuri
- b) POKMASWAS Inmam
- c) BLUD UPTD KKP Raja Ampat
- d) Kelompok Karbon
- e) Kelompok Terumbu Karang
- f) Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
- g) KUB Inkonem
- h) KUB Mujur
- i) POKDAKAN Ingkoi
- j) POKDAKAN Korusuwan
- k) POKLAHSAR Mandemor
- l) POKLAHSAR Manyarido
- m) Masyarakat Kampung Meosmanggara
- n) Kelompok Pemanfaat Kawasan Konervasi Masa Dimawa
- o) POKMASWAS Wifwoo Misool
- p) Masyarakat Kampung Yellu
- q) Kelompok Pengelola Danau Ubur-ubur Kampung Tomolol Aine Ama



Gambar 1.A.8 Workshop Diseminasi dan Exit Strategi COREMAP-CTI WB Papua Barat



Gambar 1.A.9 Pemeriksaan Aset COREMAP-CTI WB Raja Ampat

1. Sub Komponen 3.1 Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Jenis Terancam

1.1. Indikator 3.1 Infrastruktur Kecil Ekowisata

1.1.1. Paket Kegiatan 1 – Yayasan Terangi

a. Pembangunan Infrastruktur

Hingga Maret 2022, seluruh infrastruktur telah selesai dibangun. Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yayasan Terangi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.1 Proses Pembangunan Infrastruktur COREMAP-CTI Paket 1

Infrastruktur	Status	Progres
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Dayan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Jetty Apung di Meosarar (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Yellu (KKPD Misool)	Konstruksi	100%
Jalur Pendakian Danau Ubur-ubur (KKPD Misool)	Konstruksi	100%
KJA di Mutus (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
KJA di Arefi Selatan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
KJA di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%

b. Workshop Promosi Wisata Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2022 di D'Coral Resort, Waisai. Pada hari pertama, kelompok usaha masyarakat mendapatkan materi berupa presentasi, workshop, dan diskusi. Kegiatan dibuka oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata Bidang Sumber Daya Manusia Kab. Raja Ampat dan Pematik diskusi memaparkan materi-materi berikut : Digital Marketing, Konten adalah Produk, serta Sosial Media sebagai Pasar Dunia. Setelah pematik diskusi menyampaikan presentasi materi pentingnya digital marketing untuk media penjualan jasa di internet, dilanjutkan materi tentang konten adalah produk. Setelah mendapatkan materi mengenai konten, peserta melakukan praktik langsung dengan cara pengambilan foto dan video di sekitar D'Coral Resort untuk memberitahu cara pengambilan gambar yang baik dan menarik. Sebelum dilanjutkan materi, peserta diajarkan membuat logo usaha menggunakan aplikasi Canva. Kemudian materi dilanjutkan dengan topik sosial media sebagai platform pemasaran produk jasa mereka. Peserta juga diajarkan praktik membuat akun di sosial media yaitu Instagram dan cara mengedit reels di Instagram lalu hasil editan tersebut di upload di akun sosial media mereka. Hari kedua diawali dengan review materi yang telah diperoleh di hari pertama. Peserta dari kelompok usaha masyarakat masih mendapatkan materi berupa presentasi, workshop, dan diskusi. Pematik materi menyampaikan materi-materi berikut: Marketplace dan Portal Pariwisata. Pada hari kedua ini, peserta diajarkan membuat akun pada salah satu marketplace yaitu Air BnB sebagai media pemasaran produk jasa mereka. Peserta diajarkan hingga bisa paham menggunakan aplikasi tersebut dan mengunggah produk dan pengaturan rekening yang digunakan dalam transaksi jual beli serta mengakses segala sesuatu di portal tersebut. Kemudian peserta kelompok usaha masyarakat juga diajarkan membuat akun pada website pesonarajaampat.com sebagai salah satu platform pemasaran produk untuk mempermudah penjualan usaha mereka dan hasil dari kegiatan workshop hari pertama bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan berjualan di marketplace dan website <http://www.pesonarajaampat.com>.



Gambar 1.A.10 Workshop Promosi Wisata Berbasis Masyarakat

c. Pelatihan Penilaian Biodiversitas Ikan Terumbu Karang

Pada tanggal 23-27 Maret 2022 telah dilaksanakan Pelatihan Penilaian Biodiversitas Ikan Terumbu Karang di Korpak Villa dan Resort, Waisai, Papua Barat. Keluaran dari kegiatan ini agar meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pengumpulan data biodiversitas ikan terumbu karang dengan metode Underwater Visual Census (UVC). Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari:

1. BKKPN Kupang
2. BKKPN Kupang - Satker Raja Ampat
3. Loka PSPL Sorong
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat
5. BLUD - UPTD Kabupaten Raja Ampat
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
7. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Papua (UNIPA)
8. Poltek Kelautan dan Perikanan Sorong
9. Kelompok Masyarakat
10. Laleikai Nature-lodge

Kegiatan dilanjutkan dengan Asesmen Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Penilai Biodiversitas Ikan Terumbu Karang pada tanggal 28-31 Maret 2022 di tempat yang sama. Keluaran dari kegiatan asesmen ini agar pengelola kawasan yang tersertifikasi dalam pengumpulan data biodiversitas ikan terumbu karang dengan metode Underwater Visual Census (UVC).

1.1.2. Paket Kegiatan 2 – Yapeka

a. Pembangunan Infrastruktur Ekowisata Skala Kecil

Pada periode triwulan pertama 2022, seluruh infrastruktur yang dikerjakan oleh Paket 2 telah selesai dibangun. Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yapeka di TNP Laut sawu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.A.2 Proses Pembangunan Infrastruktur COREMAP-CTI Paket 2

Infrastruktur	Progres Pembangunan
PLTS di Nusa Manuk	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Sabu	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Oesina	100%
Menara Pantau Cetecea di Semau	100%

b. Pelatihan dan Sertifikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Kegiatan Pariwisata

Pada tanggal 26-29 Januari 2022 telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata yang Berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Sri Yanti selaku Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, dan Kepala BKKPN Kupang. Dalam 3 hari pertama kegiatan ini, peserta diberikan 6 topik materi pelatihan oleh trainer, dimana per-harinya disampaikan 2 topik materi. Selain itu pada hari ketiga dilaksanakan kegiatan sertifikasi oleh Tim LSP-Kelautan. Pada hari terakhir dilakukan lanjutan kegiatan sertifikasi oleh Tim LSP-Kelautan serta acara penutupan.



Gambar 1.A.11 Pelatihan dan Sertifikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata yang Berkelanjutan

c. Pelatihan Manajemen Bisnis ekowista di TNP Laut Sawu

Pada tanggal 23-24 Februari 2022 telah dilaksanakan pelatihan manajemen bisnis ekowista di TNP laut Sawu yang diikuti oleh Pokdarwis Desa Lifuleo, Desa Naikean, Komunitas Bukan Sekedar Pasiar (BSP) dan Komunitas Beta Cinta Laut (BCL), yang diselenggarakan di Kupang. Pelatihan ini meliputi pemahaman dan praktik penerapan konsep manajemen bisnis ekowisata dengan metode bisnis model canvas (BMC), CHSE, dan Homestay.

d. Pelatihan pembuatan industri rumah tangga: bawang goreng di Desa Naikean

Pada tanggal 9-10 Februari 2022 telah diselenggarakan pelatihan pembuatan bawang goreng di Desa Naikean. Desa Naikean di Pulau Semau merupakan salah satu desa penghasil bawang di NTT. Kegiatan pembuatan bawang goreng diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Naikean.



Gambar 1.A.12 Pelatihan pembuatan bawang goreng di Desa Naikean

e. Diseminasi SOP/Panduan Ekowista, Model Bisnis ekowisata dan kesepakatan pengembangan ekowisata di TNP Laut Sawu

Pada tanggal 22-23 Maret 2022 telah dilaksanakan Workshop Diseminasi SOP/Panduan Ekowisata, Model Bisnis Ekowisata dan kesepakatan pengembangan ekowisata di Laut Sawu dan dihadiri oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, BKKPN Kupang, DKPPNTT, Akademisi, Media masa dan kelompok masyarakat. Dalam workshop disepakati rekomendasi pengembangan ekowisata TNP laut Sawu, dan disepakati Kemitraan Multi Pihak Pengembangan Ekowisata di Laut Sawu antara BKKPN Kupang - YAPEKA - BSP - JBS - dan Pokdarwis Oesina serta Pokdarwis Naikean.



Gambar 1.A.13 Workshop Diseminasi SOP/Panduan Ekowisata, Model Bisnis Ekowisata

f. Paket Wisata di TNP Laut Sawu

Yapeka bersama-sama dengan komunitas Bukan Sekedar Pasiar (BSP) serta Pokdarwis Oesina melakukan uji coba paket wisata di Pantai Oesina pada tanggal 24 Maret 2022. Peserta uji coba adalah perwakilan jurnalis dan influencer di NTT.



Gambar 1.A.14 Foto bersama peserta media visit dan uji coba paket wisata

1.2. Indikator 3.4 Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu, Cetacea dan Pari Manta

1.2.1. Paket Kegiatan 3 – Yayasan Reefcheck Indonesia

a. Pendataan hasil tangkapan elasmobranchii di Papua Barat melalui enumerasi di lokasi pendaratan perikanan dengan menerapkan sistem website database dan mobile apps

Selama bulan Januari 2022, secara umum kondisi jenis ikan hiu dan pari masih tetap diperdagangkan, dengan jenis-jenis ikan hiu dan pari yang termasuk dalam daftar appendix namun hanya dengan skala kecil. Faktor penentu untuk Jumlah jenis yang ditemukan sangat bergantung pada bulan gelap dan bulan terang, biasanya jika bulan gelap maka hasil tangkapan banyak dan sedikit jika bulan terang. Tercatat Ditemukan 4 famili yaitu: Rhinobatidae, Dasytidae, Rhinopteridae, dan Carcharhinidae. Untuk jumlah total keseluruhan jenis ikan hiu dan pari yang ditemukan adalah sebanyak 40 ekor. Jenis ikan yang memiliki jumlah terbanyak yaitu *Dasysatis americana* dari kelompok Famili Dasytidae.

b. Uji coba untuk menilai efektivitas penggunaan lampu LED sebagai alat mitigasi bycatch elasmobranchii di TNP Laut Sawu

Hasil dari kegiatan uji coba pemasangan lampu LED di daerah Pulau Mules yaitu mendapatkan hasil tangkapan yang bukan target utama seperti Pari Burung / *Aetomylaeus nichofii* didapatkan pada perahu control dan pari Uppu / *Taeniura lymma* di dapatkan pada perahu Experimen. Hasil tangkapan utama yang paling banyak di dapatkan adalah ikan-ikan domersal yang berukuran lumayan besar dan dengan nilai jual yang memuaskan, namun untuk tangkapan ikan-ikan pelagis tidak begitu banyak

didapatkan. Dalam trip kali ini untuk hasil tangkapan masih cukup untuk menutupi kehidupan sehari-hari nelayan. Dari total 12 trip yang dilakukan di bulan Januari masing-masing perahu Control dan perahu Experimen mendapatkan bycatch yang bernilai ekonomis. Kondisi cuaca menjadi Kendala utama dalam Trip di bulan Januari ini, dalam beberapa hari terjadi angin kencang disertai hujan deras di malam hari yang mengakibatkan tidak bisa melakukan aktivitas melaut seperti biasanya dan ditutup dengan melakukan kegiatan di darat seperti memberikan pelatihan cara penggunaan GPS dan Camera serta melakukan wawancara kepada nelayan aktif di daerah Pulau Mules

c. Sosialisasi dan Uji Coba Panduan Laku Wisata Hiu Karang dan Pari Manta di Raja Ampat

Pengembangan wisata bahari yang tidak sejalan dengan aspek lingkungan telah diketahui memberikan dampak buruk terhadap ekosistem di laut. Contoh kasusnya adalah pariwisata manta dan hiu di suatu lokasi penyelaman yang tidak diatur akan menyebabkan over-capacity jumlah penyelam, sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas ekologis dari biota tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan Panduan laku wisata berkelanjutan hiu karang, pari manta, dan cetacea disusun berdasarkan kajian pustaka tentang dasar-dasar ilmiah panduan laku.

Panduan laku ini perlu disosialisasikan kepada kelompok masyarakat wisata dan pemangku kepentingan lainnya di Raja Ampat. Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 di Raja Ampat dengan tujuan untuk sosialisasi dan uji coba panduan laku wisata hiu karang dan pari manta kepada potensial pelaku wisata dan pemangku kepentingan terkait di Raja Ampat.

d. Pertemuan Penguatan Jejaring Penanganan Mamalia Laut Terdampar Nasional

Pertemuan ini diadakan pada tanggal 15-16 Maret 2022 secara luring di Courtyard Seminyak Bali dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Perlu adanya revisi dan beberapa tambahan di dalam poster penanganan mamalia laut terdampar yang saat ini sedang disusun
- Tugas POKJA di setiap daerah harus jelas
- Perlu adanya anggaran khusus untuk penanganan mamalia laut terdampar atau bila perlu, mencari bantuan dari pihak swasta
- Dukungan daerah terkait penanganan mamalia laut terdampar seperti menyediakan fasilitas alat berat dan kapal, dinas terkait (Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, DKP, Dinas Sosial, Damkar, TAGANA, Dinas Lingkungan Hidup.
- Memperkuat call center
- Sertifikasi dokter hewan melalui PDHI perlu dipertimbangkan
- Hasil rekomendasi pertemuan akan ditindaklanjuti ke stakeholder terkait untuk penguatan jejaring di tingkat nasional



Gambar 1.A.15 Penguatan Jejaring Penanganan Mamalia Laut Terdampar Nasional

2. Sub Komponen 3.2 Pengelolaan Pesisir Terpadu (RZWP-3-K) Papua Barat

2.1. Paket Kegiatan 4 – PKSPL IPB

a. Training of trainer dan workshop fasilitator ICZM

Pada tanggal 25-29 Januari 2022 telah dilaksanakan kegiatan Training of Trainer dan Workshop Fasilitator TICZM di Hotel Merusaka, Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Sri Yanti selaku Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas. Pengajar dan fasilitator pelatihan ini berasal dari BAPPENAS, FPIK IPB, PKSPL IPB, Pemsea Site (PNLG), ATSEA-2 PEMSEA, Dinas Perikanan NTB dan Dinas Pariwisata Bali. Dalam 3 hari pertama, peserta diberikan 15 topik materi oleh para Pengajar dan Fasilitator di dalam ruangan, selanjutnya pada hari ke-4 para peserta melakukan kunjungan ke Kawasan Konservasi Perairan dan Pengelolaan Sampah di Nusa Penida dan dilanjutkan dengan Meninjau pengalaman dan pelajaran dari kunjungan lapangan. Pada hari terakhir, peserta diberikan 1 topik materi dan dilanjutkan dengan merencanakan modul pelatihan yang disusun dari proses pembelajaran dan studi kasus serta materi pelatihan, serta dilakukan juga praktek mengajar. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi dan post-test serta penutupan oleh Kepala PKSPL IPB.



Gambar 1.A.16 Training of trainer dan workshop fasilitator ICZM

b. Aksi Bersih Pantai

1. Raja Ampat

Pada tanggal 7-11 Februari 2022 telah dilaksanakan kegiatan bersih pantai di Raja Ampat, Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh akademisi dan para stakeholders. Adapun ruang lingkup kegiatan ini dalam wujud aksi bersih pantai yang dijadikan wadah penyampaian berbagai informasi positif terkait kondisi lingkungan sendiri dalam bentuk kegiatan upacara, aksi bersih pantai bersama, dan games bersama, sehingga kegiatan ini dapat menyadartahukan masyarakat luas dan meningkatkan kepedulian masyarakat setempat tentang pengelolaan pesisir secara berkelanjutan.



Gambar 1.A.17 Kegiatan Aksi Bersih Pantai di Raja Ampat

2. Manokwari

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Maret 2022. Terdapat dua kegiatan pokok yang diadakan dalam kegiatan aksi bersih pantai di Manokwari, yaitu kampanye publik dan aksi bersih pantai. Kegiatan kampanye publik meningkatkan minat mahasiswa dalam mengelola sumberdaya pesisir Manokwari. Selain itu, kampanye publik juga memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup sumberdaya pesisir. Kegiatan aksi bersih pantai diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli lingkungan oleh masyarakat Manokwari khususnya penduduk Pulau Mansinam. Dengan adanya kegiatan aksi bersih pantai ini juga meningkatkan minat masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan Pulau Mansinam dan menjadikan kegiatan bersih pantai menjadi kegiatan rutin tahunan untuk seluruh warga Manokwari.



Gambar 1.A.17 Kegiatan Aksi Bersih Pantai di Manokwari

c. Workshop Finalisasi, rencana teknis dan SOP pemanfaatan kawasan konservasi perairan berdasarkan daya dukung Provinsi Papua Barat

Pada tanggal 28 Maret 2022 telah dilaksanakan kegiatan Workshop Finalisasi, rencana teknis dan SOP pemanfaatan kawasan konservasi perairan berdasarkan daya dukung Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran dalam penyempurnaan dan finalisasi dokumen rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi perairan (KKP) berdasarkan daya dukung dari pengelola kawasan (SAP Waigeo Sebelah Barat, SAP Kepulauan Raja Ampat dan TWP Selat Dampier).

3. Sub Komponen 3.3 Penatalayanan Sumber Daya Pesisir Oleh Masyarakat

3.1. Paket Kegiatan 5 – Yayasan Terangi

a. Pembangunan Menara POKMASWAS

Hingga bulan Maret 2022, progres pembangunan menara pengawas di seluruh lokasi telah mencapai 100%. Progress pembangunan Menara POKMASWAS yang dilakukan oleh Yayasan Terangi sampai dengan kuartal 1 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.3 Proses Pembangunan Infrastruktur COREMAP-CTI Paket 5

INFRASTRUKTUR	STATUS	PROGRESS
Menara Pengawas di Meosmanggara (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sauwandarek (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Harapan Jaya (KKPD Misool)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sabu Raijua (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Rote Ndao (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sumba Barat Daya (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Manggarai (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%

b. Pembuatan Perahu Pengawas

Progres konstruksi pembuatan perahu pengawas untuk lokasi di Raja Ampat sudah mencapai 100% untuk 4 unit perahu pengawas. Untuk progres konstruksi pembuatan perahu pengawas untuk Laut Sawu juga sudah mencapai 100% untuk 5 unit perahu pengawas.



Gambar 1.A.18. Kapal Pengawas di Laut Sawu (kiri) dan Raja Ampat (kanan)

c. Sea Trial Perahu Pengawas Laut Sawu

Pada tanggal 10-12 Januari 2022 telah dilaksanakan kegiatan *Sea Trial* Perahu Pengawas di Labuan Bajo dan Nuca Molas. Hari pertama sesampainya di Labuan Bajo, dilakukan *Sea trial* dan dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan PT. Gin Solusi Kreatif. Hari kedua dilakukan perjalanan ke Nuca Molas menggunakan perahu pengawas KP TARUNJU dan KP ANAKALANG, dilanjutkan dengan kegiatan dokumentasi di Menara Pengawas.

d. Pelatihan Selam Tingkat Dasar

Pada tanggal 21-24 Maret 2022 telah dilaksanakan pelatihan selam tingkat dasar di Kupang, NTT. Total peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Selam Tingkat Dasar sejumlah 10 orang yang terdiri dari 2 orang Staff ICCTF-Bappenas, 2 orang BKKPN Kupang, 2 orang DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 orang masyarakat pengawas (POKMASWAS) TNP Laut Sawu. Pemantik diskusi memaparkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif bagi para peserta dalam melakukan penyelaman yang baik dan benar, mengenalkan alat-alat penyelaman, mengenalkan penyakit-penyakit dalam penyelaman.



Gambar 1.A.19 Pelatihan Selam Tingkat Dasar

e. Workshop Pemantauan Ekosistem Pesisir Berbasis Masyarakat di Raja Ampat

Kegiatan workshop dilakukan dengan pembekalan materi dan praktik lapangan. Pembekalan materi dilaksanakan di Waigeo Resort, Waisai pada tanggal 24-25 Maret 2022 dengan memberikan pemahaman mengenai pengenalan, identifikasi jenis, pengambilan dan pengolahan data dari ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove. Selain itu juga peserta dibekali pemahaman tujuan pemantauan ekosistem pesisir secara berkala dan kurun waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui kondisi ekosistem pesisir. Praktik lapangan dilakukan di sekitaran Waigeo Resort. Teknis kegiatan

dilakukan dengan membagi peserta dalam beberapa kelompok sebelum melakukan pengamatan dan pengambilan data pada ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun. Peserta berhasil membedakan setiap jenis dari beberapa ekosistem pesisir yang ditemukan serta dapat mengambil data pengukuran dari pohon mangrove yang ditemukan, menghitung tutupan dari ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Kelompok masyarakat juga dilatih dalam melaporkan data dengan menyusun laporan secara tertulis. Komponen laporan pelaporan data terdiri atas judul, pelaksana, tujuan pemantauan, metode pemantauan, hasil, dan kesimpulan. Setelah mengikuti workshop ini, diharapkan mampu secara rutin melakukan pemantauan dan pelaporan data dari tiap ekosistem pesisir yang diamati.



Gambar 1.A.20 Workshop Pemantauan Ekosistem Pesisir Berbasis Masyarakat

f. Workshop SOP Perahu Pengawas di Raja Ampat

Kegiatan workshop terkait pemaparan dan pembuatan SOP perahu pengawas dilakukan di Waigeo Resort, Waisai pada tanggal 26 Maret 2022. Kegiatan dimulai dengan presentasi tujuan dan fungsi adanya perahu pengawas dengan fokus bidang POKMASWAS yaitu memantau, mendengar, dan melaporkan. Hibah 4 perahu yang diberikan kepada POKMASWAS juga bukan hanya terpusat di 1 kelompok saja tetapi ditujukan untuk beberapa kelompok, harapannya POKMASWAS dapat lebih unggul dalam melakukan kegiatan pemantauan yang lebih efektif. Pembuatan SOP perahu POKMASWAS dimaksudkan agar tidak terjadinya perselisihan dan penyamarataan hak diantara beberapa kelompok yang menggunakan perahu pengawasan secara bersama dengan kebijakan dari masing-masing kelompok. Keputusan yang diambil oleh POKMASWAS Raja Ampat adalah izin penggunaan perahu pengawas selama kegiatan patroli dan bukan untuk urusan pribadi harus disepakati oleh ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara. List perlengkapan juga dibutuhkan untuk perawatan kapal sehingga setiap kelompok yang menggunakan perahu harus bertanggung jawab untuk kerusakan perahu ketika patroli.

3.2. Paket Kegiatan 6 – PILI

a. Program Pendampingan di Kabupaten Rote Ndao

Tanggal 6 Januari 2022, kegiatan dilakukan di kantor Desa Sotimori yang dibuka langsung oleh Kepala Desa Sotimori. Setelah pembukaan, dilaksanakan penyusunan proposal teknis kemitraan. Dalam kegiatan ini kelompok diajak untuk menyusun kembali rencana kerja kelompok untuk tahun 2022, memasukan kelompok dari iuran, modal untuk kegiatan agar dapat berjalan, harga jual, keuntungan dan target ke depan, dan rencana kelompok untuk bermitra.



Gambar 1.A.21 Foto bersama setelah kegiatan di Desa Sotimori

Tanggal 7 Januari 2022, dilakukan kegiatan yang sama di Desa Oelua. Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Oelua. Kegiatan penyusunan proposal kemitraan dilaksanakan dengan membagi peserta ke dalam 3 kelompok, dimana kelompok tersebut dibagi berdasarkan masing-masing kelompok yg ada (KUB Bintang Selatan, Poklahsar Tulufali dan Pokmaswas Manaholo Desa Oelua). Dalam kegiatan ini masing-masing kelompok diajak untuk menyusun kembali rencana kerja kelompok untuk tahun 2022, memasukan kelompok dari iuran, modal untuk kegiatan agar dapat berjalan, harga jual, keuntungan dan target kedepan, dan rencana kelompok untuk bermitra. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bulanan kelompok, dalam hal ini masing-masing kelompok membahas rencana revitalisasi dan mendiskusikan baik buruknya penambahan anggota untuk kedepannya. Jika ada penambahan anggota mungkin akan mengakibatkan kecemburuan dalam kelompok, hal ini dapat diatasi apabila anggota tambahan nanti bersedia untuk mengikuti aturan dan mekanisme kelompok yang sudah ada. Sehingga tidak ada perpecahan di dalam internal kelompok.



Gambar 1.A.22 Foto bersama setelah kegiatan di Desa Oelua

b. Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Best Management Practices (BMPs) di Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat

Tanggal 12 Januari dilakukan pembukaan kegiatan workshop di Harris Hotel and Conventions Gubeng Surabaya. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Direktur Yayasan PILI kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Project Manager Paket 6. Tanggal 13 Januari 2022 tim melanjutkan kegiatan Workshop BMPs di Ballroom Majestik 1, Harris Hotel and Conventions Gubeng Surabaya. Dalam kegiatan dilakukan pemaparan hasil penulisan tim PILI sekaligus pemaparan dari para contributor. Workshop dibagi dalam dua sesi, sesi pertama yaitu pembahasan BMP 1 (KMHA), 2 (RBFM). Sesi kedua yaitu workshop pembahasan BMP 3 (RPP), dan 4 (Kemitraan). Pada akhir kegiatan dilakukan penyepakatan waktu untuk pembahasan lebih lanjut secara online bersama tim dan kontributor. Disepakati bahwa akan ada pertemuan online setiap 2 minggu sekali.



Gambar 1.A.23 Foto Bersama dalam Workshop Money Penyusunan BMPs

c. Dukungan untuk KMHA dan Draft Naskah Akademik

Pada bulan Februari 2022, highlight pencapaian Paket 6 antara lain sebagai berikut:

- Dukungan untuk panitia KMHA di tingkat kabupaten untuk identifikasi wilayah KMHA di Raja Ampat dan juga dukungan kebijakan dengan diskusi draft naskah akademik tentang perlindungan KMHA.
- Kegiatan draft naskah akademik sudah selesai dilakukan sedangkan untuk kegiatan di kabupaten Rote masih dikawal oleh Kabag Hukum dan DPMD yang dimandati untuk adanya dana pemda terkait kebijakan KMHA. Kegiatan studi dampak juga dilakukan di 2 site baik TNP laut sawu dan juga di SAP Raja Ampat dengan turun ke kelompok di 3 KMHA.
- Pendampingan kelompok pengolahan hasil perikanan dilakukan di 3 KMHA. Untuk di kampung Mutus selain pendampingan kelompok juga rutin dilakukan pelatihan untuk kelompok pengolah untuk persyaratan terbit ijin PIRT dan juga pembuatan rumah garam. Kegiatan pelatihan pengolahan, kegiatan pelatihan terumbu karang dan juga pembuatan rumah garam juga masih dilakukan di kelompok untuk memaksimalkan pendampingan.

d. Workshop Diseminasi BMPs

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 di Hotel The Sahira Bogor. Agenda dari kegiatan ini merupakan workshop diseminasi best management practices (BMPs). Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari PILI oleh Rully, kemudian dilanjut dengan sambutan dari BAPPENAS oleh ibu Setyawati. Dari kegiatan ini diperoleh adanya beberapa dokumen BMPs PILI yang terdiri dari:

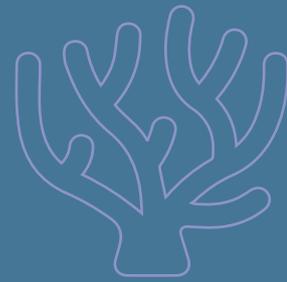
- BMP 1 : Akses dan Perlindungan KMHA
- BMP 2 : Praktik RBFM
- BMP 3 : Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
- BMP 4 : Kemitraan

Dari hasil diskusi ini diperoleh bahwa praktek terbaik dan pendampingan kelompok akan terus dilanjutkan. Adanya harapan bahwa BMP dapat menjadi pembelajaran dan dapat diadopsi oleh kegiatan selanjutnya. Selain itu diharapkan ruang-ruang diskusi seperti ini dapat terus dilakukan untuk memperkaya pembelajaran yang ada.



Gambar 1.A.24 Diskusi pembahasan draft final BMPs PILI

B. COREMAP–CTI Asian Development Bank



Kegiatan PIU COREMAP-CTI ADB

a. Pembahasan Proses Pengadaan Gili Matra

Pada tanggal 19 Januari 2022, ICCTF melaksanakan pertemuan bersama para mitra dengan agenda membahas proses pengadaan COREMAP-CTI ADB di Gili Matra. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Ada 3 rencana kegiatan yang akan dilelang yakni menara pantau, speedboat POKMASWAS dan peralatan POKMASWAS yang sudah ada calon vendor
- Pembuatan kapal pengawas di kerjakan minimal 1 bulan
- Pembangunan infrastruktur di laksanakan selama 4–5 bulan
- Serah terima pembangunan di laksanakan di bulan agustus
- Diharapkan penyerahan kapal pengawas disertai dengan penyerahan perlengkapan Pokmaswas di akhir bulan Mei
- Untuk penitipan barang harus ada berita acara penitipan barang sementara

b. Steering Committee COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022, bertempat di Hotel Mandarin, Jakarta. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah penyampaian Laporan Kegiatan COREMAP-CTI ADB Tahun 2021 dan rencana kegiatan Tahun 2022. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Proyek COREMAP-CTI bantuan ADB dilaksanakan berdasarkan Dokumen Proyek yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Desember 2013 untuk durasi waktu pelaksanaan proyek selama 6 tahun.
- Executing Agency dari proyek ini adalah Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas dengan total dana hibah sebesar USD 5,221,135.04
- Perkembangan terkait dengan serapan anggaran, yaitu pada tahun 2020 sebesar USD 78.247,51 dan pada 2021 sebesar USD 1.327.184,80. Total prosentasi serapan terhadap total anggaran adalah 27%

- Tantangan yang dihadapi oleh proyek COREMAP-CTI ADB adalah:
 - a. Keterlambatan capaian karena situasi Pandemi Covid-19. Untuk itu, mitigasi yang dilakukan adalah Identifikasi rencana kerja prioritas dan percepatan pelaksanaan melalui pendampingan intensif kepada mitra
 - b. Perubahan lokasi pembangunan infrastruktur. Saat ini, komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah untuk identifikasi lokasi potensial dengan pengelolaan yang efektif
 - c. Penundaan kajian karena faktor musim kemunculan ikan (terutama Mola-mola). Mitra, bersama dengan tenaga ahli telah melakukan pemantauan intensif terhadap data kemunculan ikan dan penyiapan kajian bersama dengan pemangku kepentingan.



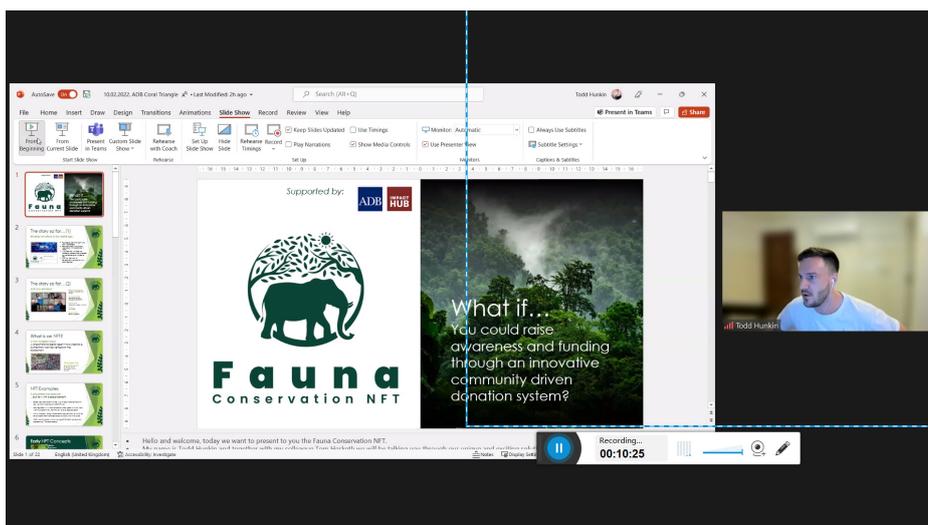
Gambar 1.B.1 Pembukaan acara oleh Deputi Bidang KSDA, Bappenas

c. Undangan ADB: Opportunity to pilot NFTs for Indonesia "Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative

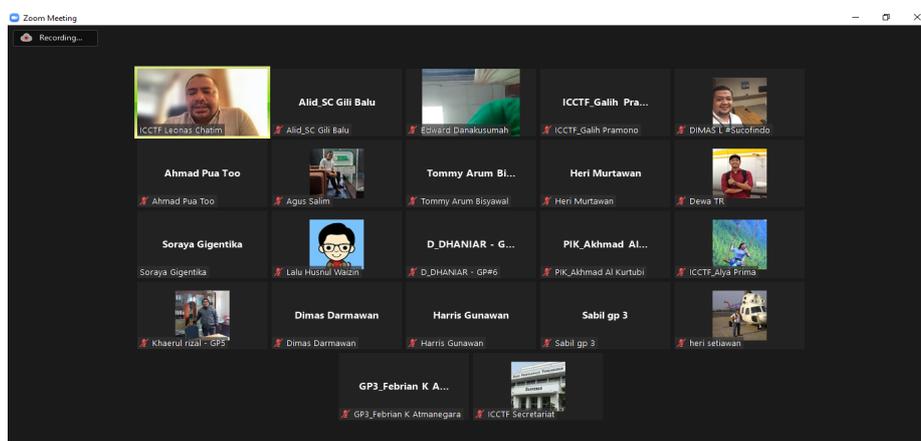
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah pembahasan pilot NFT untuk COREMAP-CTI. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Ide Penggunaan NFT berasal dari kesadaran lingkungan lewat donasi lewat Crypto dan NFT
- Organisasi yang telah melakukan penjualan NFT adalah WWF
- Untuk gambaran yang bisa dilakukan oleh tim COREMAP yaitu bisa lewat foto dari hewan eksotis atau dengan pemandangan yang indah
- Berbagai jenis foto bisa di gunakan, yang pasti kualitas dari resolusinya bagus. Tidak harus menggunakan fotografer profesional, bisa juga artis gambar (desain grafis)

- Hak cipta akan masuk ke ADB, namun hal tersebut bisa didiskusikan lagi di kontrak, apakah nanti photographer atau designer.
- Untuk legalitas crypto currency sementara ini masih belum bisa dipastikan. Tapi UNICEF sudah memulai donasi dengan Crypto currency. Tentunya tiap negara memiliki peraturan masing-masing.



Gambar 1.B.2 Penjelasan NFT oleh narasumber



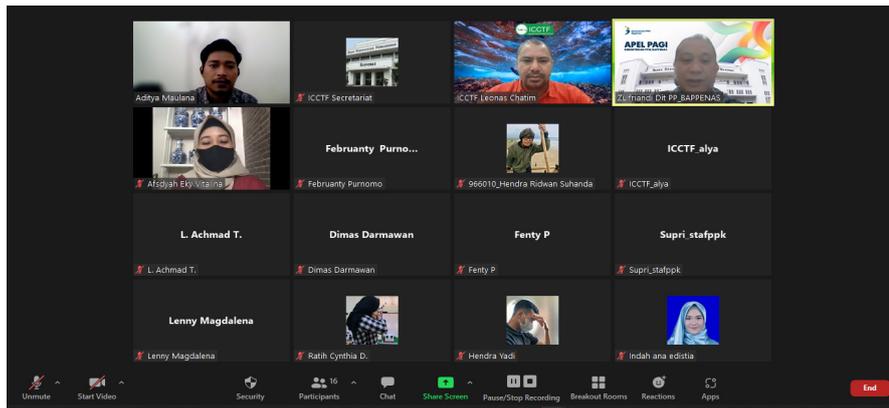
Gambar 1.B.3 Diskusi Proses Pengadaan

d. Pembahasan Addendum Kontrak Paket 5 ADB-DCM

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah pembahasan addendum penggantian Finance and Administration Officer dan schedule of payment pada proyek GP-5. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Penggantian finance and administration officer yang semula M. Mustafa Tohir digantikan oleh Nurizki Larasati Basrawy

- Terkait addendum, dalam proses pelaksanaan harus ada surat yang disampaikan ke PPK, dilakukan pembahasan yang akan menjadi dasar addendum kontrak.
- Dalam surat yang disampaikan sudah memuat pengajuan penggantian personil, durasi pembayaran dan jumlah termin pembayaran.
- Melihat kondisi yang terjadi perlu adanya penambahan termin.



Gambar 1.B.4 Diskusi pembahasan addendum kontrak

e. Monev COREMAP-CTI ADB Tahun Anggaran 2022

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022. Agenda kegiatannya adalah pembahasan monitoring dan evaluasi program COREMAP-CTI ADB. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Menyampaikan perkembangan status dari Target MPA COREMAP-CTI ADB pada Desember 2022 ini adalah 3 MPA di Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu, serta status Efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Terkait efektifitas MPA sebagaimana mengacu pada Design Monitoring Framework (DMF), untuk MPA Batam, Natuna, Bintan dan Lingga masih menunggu proses penetapan dari Ditjen PRL, KKP.
- Beberapa Rencana aksi yang harus dilakukan oleh tiap mitra pelaksana, diantaranya:
 1. Percepatan finalisasi DED infrastruktur pendukung eco-tourism dan pengawasan
 2. Finalisasi survey terkait ekosistem terumbu karang, mangrove dan ETP spesies
 3. Pelaksanaan pelatihan terkait eco-tourism dan konservasi
 4. memastikan pelaksanaan pengadaan sarana pendukung POKMASWAS dan Kelompok Usaha

- Mengantisipasi waktu pelaksanaan yang singkat sementara beberapa pekerjaan masih berlangsung, maka tiap-tiap mitra pelaksana perlu mempertimbangkan perubahan dari Kontrak pekerjaan. Apabila perubahan tidak dapat dihindari maka bagian terpenting dan harus dipersiapkan adalah addendum kontrak.
- Namun demikian, timeline pekerjaan (waktu kerja) harus diperhatikan agar tidak melebihi waktu yang ditetapkan
- Terkait serah terima aset sudah mulai dipersiapkan penerima dan keberlanjutannya
- Publikasi harus mulai dibuat untuk menjadi bagian dari media komunikasi

Alokasi anggaran COREMAP CTI 2022 sebesar Rp. ± 52,8M	Penyelesaian Pembangunan Infrastructure dan pengadaan barang, diantaranya:	Penyelesaian laporan kajian, Naskah Akademik, Survey, Penelitian, yaitu:
<ul style="list-style-type: none"> • Harus digunakan sampai dengan September 2022 (1 paket Kegiatan selesai di Juni 2022) • Perlu strategi percepatan kegiatan untuk memastikan penyerapan setidaknya 95% 	<ul style="list-style-type: none"> - 9 unit bangunan - 4 unit speed boat - 10 unit Tagging Penyu - 2 Tourism Management System - Peralatan operasional Pokmaswas - Peralatan pendukung Kelompok Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Standard Operation Procedure (SOP), - Naskah Akademik, Payment for Ecosystem Services (PES) - Kajian Ekowisata Mola-mola, Hiu dan Penyu, Code of Conduct (COC) - Kajian Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dan Mangrove - Kajian Cost Benefit Analysis, Willingness To Pay (WTP)

Gambar 1.B.5 Pemaparan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas

f. Pembahasan DED Mitra COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022. Agenda kegiatannya adalah pembahasan Detail Engineering Desain (DED) khusus untuk infrastruktur di Nusa Penida dan Gili Balu. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur melalui Subcon dari mitra, yang harus ada surat persetujuan PPK
- Salah satu elemen pendukung dari bangunan adalah septic tank. Terkait hal ini, pihak mitra, DED Spesialis harus menyampaikan spesifikasi septic tank sebagai bagian dari DED
- Setiap mitra pelaksana perlu Menyusun prosedur untuk serah terima baik dalam hal teknis maupun pengelolaan asset Proyek.
- SOP juga mempertimbangkan maintenace / operasional setelah melakukan serah terima asset kepada instansi yang bertanggung jawab melanjutkannya
- Sesuai dengan masukan dan arahan dari Technical Specialist, para Mitra pelaksana perlu menyampaikan hasil perbaikan gambar dan rincian secepatnya (diakhir Maret 2022)

- Penyusun DED harus menyampaikan rincian harga satuan dan harga dasar untuk bagian material dan upah
- Mitra pelaksana juga harus menyampaikan harga barang dan jasa yang sudah di lokasi pembangunan lokasi pembangunan, sebagai contoh di pulau, maka sudah mempertimbangkan ongkos ke Pulau tersebut.
- Pembangunan harus memastikan tidak mencemari lingkungan
- Selalu melakukan Pembersihan setelah konstruksi selesai
- Membuat Laporan tahapan-tahapan konstruksi

g. Pemaparan LK Program PHLN COREMAP-CTI ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022. Agenda kegiatannya adalah pembahasan monitoring dan evaluasi program COREMAP-CTI ADB. Hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Draft SOP tentang Pengawasan, Perijinan, Rehabilitasi Ekosistem Karang, Wisata Selam, dan Pemberdayaan Masyarakat sudah tersedia
- Peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dalam negeri diikuti oleh 34 peserta
- Peningkatan kapasitas Master degree sudah diikuti oleh 4 mahasiswa di Univ of Queensland dan dijadwalkan selesai pada July 2022
- Saat ini, Pelaksana Proyek di Gili Balu telah melakukan Rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 2 ha dengan menanam 20,000 bibit mangrove ditambah bibit sulaman
- Pelatihan untuk POKMASWAS sudah dilakukan

GAMBARAN UMUM HIBAH

ADB GPF ICCTP

EXECUTING AGENCY
DEPLITI KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM, BAPPPENAS

DURASI
4 Maret 2020 – 31 Desember 2022

LOKASI PROYEK
Nusa Penida, Bali Gili Matra, NTB, Gili Balu, NTB

OUTCOME
Meningkatnya kapasitas pengelolaan ekosistem terumbu karang di dalam dan di luar area MPA

NILAI HIBAH **USD 5,221,135.04**

Bapppenas_setyawati

Gambar 1.B.6 Pemaparan oleh Koordinator Perikanan, Bappenas

PROGRESS KEGIATAN MITRA PELAKSANA

1. Support for MPA Management and ETP NPOA Implementation

PAKET KEGIATAN 1

PT Trans Intra Asia (PT TIA) berkonsorsium dengan Yayasan Bahtera Nusantara

a. Workshop Pembahasan Finalisasi Dokumen Teknis Rencana Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan

Pada bulan Januari 2022, telah terlaksana 2 Workshop pembahasan finalisasi Dokumen Teknis Rencana Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) pada KKL Nusa Penida dengan UPTD KKL Nusa Penida, Dinas KP Provinsi, Operator Wisata, Asosiasi Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Komunitas, Ketua/Wakil Adat Masyarakat setempat. Pada pertemuan ini dihasilkan output kesepakatan mekanisme pungutan retribusi tiket masuk KKP Nusa Penida.

b. Ground check lokasi penyelaman wisata mola-mola

Pada Januari 2022 telah terlaksana ground check lokasi penyelaman wisata mola-mola di Nusa Penida.

PAKET KEGIATAN 2

PT Duta Cipta Mandiri berkonsorsium dengan PT Cakra Buana Aghna dan Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili Eco Trust

a. Focus Group Discussion Drafting SOP Wisata Selam

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada 21 Januari 2022 di Gili Gaya Gallery, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Lokasi prioritas merupakan lokasi utama yang akan dilakukan kajian daya dukung lebih lanjut. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan antara lain jumlah kunjungan wisata selam yang tinggi dan termasuk lokasi selam yang populer/favorit, serta beberapa lokasi diduga mengalami penurunan kondisi ekosistem terumbu karang karena tingginya aktivitas pariwisata
- TWP Gili Matra memiliki banyak lokasi wisata selam lainnya (selain 10 lokasi prioritas) yang perlu juga dipertimbangkan untuk dilakukan kajian daya dukung
- Kajian mengenai daya dukung memerlukan kegiatan survei daya dukung dan dampak kegiatan wisata selam, dengan metodologi antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer dari operator wisata selam yang telah beroperasi selama lima tahun atau lebih dan memiliki jumlah tamu yang banyak. Informasi yang diterima dari responden diperoleh melalui wawancara mendalam secara individual disertai dengan pengisian kuesioner.
2. Pengambilan data primer untuk kondisi ekosistem terumbu karang yang terkini, meliputi: tutupan karang, tutupan karang keras, keanekaragaman genera karang, jumlah general karang, kepadatan rekrutmen karang, komposisi substrat dasar, kepadatan makrobenthos, kelimpahan ikan karang, biomassa ikan karang, keanekaragaman jenis ikan karang, kompleksitas habitat, dan kerusakan karang.
3. Pengambilan data primer dengan cara pengamatan langsung dan mengikuti kegiatan operator selam, meliputi: dampak kegiatan wisata selam yang dilakukan, menghitung luasan habitat untuk pemanfaatan kegiatan wisata selam.
4. Pengumpulan data sekunder seperti fasilitas, sarana dan prasarana.
5. Analisa citra habitat untuk memperkuat data dan informasi survei daya dukung.



Gambar 1.B.7 FGD SOP Wisata Selam di Lombok Utara

b. Focus Group Discussion Visitor Management System

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada 25 Januari 2022 di Gili Gaya Gallery, Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Perlu mengusulkan untuk menambah kegiatan pelatihan peningkatan SDM terkait pengelolaan Visitor Management System
- Untuk pertemuan selanjutnya menyajikan terlebih dahulu bentuk rancangan dan fitur-fitur dari aplikasi VMS
- Memastikan Jangka waktu maintenance aplikasi dan pihak yang bertanggungjawab
- Perlu ada penyusunan regulasi tingkat kabupaten terkait operasional VMS



Gambar 1.B.8 FGD VMS di Lombok Utara

c. Diskusi Pembahasan Lanjutan Kegiatan Payment Ecosystem Services

Diskusi dilakukan secara online sebanyak 2 kali melalui Aplikasi Zoom pada tanggal 26 Januari 2022 dan 9 Februari 2022. Agenda dari diskusi pertama adalah pembahasan mekanisme PES dan penyusunan naskah akademik. Sedangkan agenda dari diskusi kedua adalah pembahasan draft naskah akademik final. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah memfinalkan naskah akademik dan tahap layout naskah akademik.

d. Diskusi Taktis dan Teknis Kegiatan GP2 dengan BKKPN Kupang

Diskusi ini dilakukan secara online melalui Aplikasi Zoom pada tanggal 3 Februari 2022. Diskusi ini membahas tentang taktis dan teknis pelaksanaan kegiatan GP2. Adapun hasil dan tindak lanjut dari diskusi ini sebagai berikut:

- Penyusunan SOP wisata selam akan dilakukan survei daya dukung pada bulan februari
- Jejaring KKP disarankan dijadikan kemitraan mengingat waktu dan progress yang dicapai mencapai 90%
- Workplan dengan waktu pelaksanaan yang pasti

PAKET KEGIATAN 3

PT Cakra
Buana Aghna

a. FGD Penilaian Daya Dukung Wisata di Gili Balu

Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 15-16 Januari 2021 di Kantor COREMAP-CTI GP3 yang mana diikuti oleh perwakilan kelompok masyarakat seperti Pokdarwis dan Pokmaswas Poto Tano, Kiantar, Senayan dan Tambak Sari. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam diskusi tersebut yaitu:

- Pokdarwis harus kuat dalam tingkat hubungan antara anggota sebagai garda terdepan untuk percepatan pariwisata di Gili Balu
- Identifikasi terumbu karang dengan cara foto sebanyak mungkin kemudian buka buku sambil di bandingkan dengan gambar yang telah di foto dengan gambar yang di buku
- Kelompok Ibu-Ibu harus belajar selera makanan wisatawan terutama orang luar negeri
- Selain keindahan, keamanan juga sangat penting dalam pengembangan kawasan pariwisata karena tingkat kepuasan wisatawan merupakan prioritas utama dalam melayani wisatawan
- Membuat paket wisata yang mewakili destinasi di luar Poto Tano seperti mantar untuk paralayang, tenun dengan pewarna alami, fashion dengan brand Pariri Lema Bariri
- Pokdarwis sebaiknya membuat kalender musim dan kalender wisata
- Training smartphone fotografi terhadap pemuda di Kawasan Gili Balu



Gambar 1.B.9 FGD penilaian daya dukung wisata di Gili Balu

b. Konsultasi Publik I SOP Prioritas

Konsultasi Publik I SOP Prioritas diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2022 di Hotel Prime Park, Mataram. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam konsultasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- SOP Sangat baik sebagai manual-manual pedoman yang dituangkan untuk dilakukan oleh petugas-petugas pokmaswas, maupun polsus.
- Untuk SOP nya kami banyak melihat tentang penangkapan ikan dan pembudidaya ikan, tapi kami belum melihat detail tentang penelitian dan pendidikannya mana yang boleh dan mana yang tidak sehingga teman-teman baik polisi husus maupun pokmaswas itu bisa mempedomani manual ini. demikian juga disana banyak sekali pemanfaatan air laut terutama untuk pembuatan kolam atau sebagainya, kemudian ada juga pemanfaatan untuk transportasi perairan. Mudahan di SOP pengawasan ini bisa ditambahkan supaya lebih sempurna.
- Untuk objek pengawasan bukan hanya tentang pengeboman atau penangkapan ikan saja akan tetapi objek pengawasan yang dimaksud disini sesuai dengan peraturan menteri KP 47 itu, jadi jika lihat orang tebang bakau atau gali gali karang ya harus di tindak sesuai SOP ini karena itu termasuk kegiatan yang mencurigakan.
- Detail objek pengawasan berada pada Permen KP 47 dan di Peraturan Dirjen Pengawasan PSDKP no 11 tahun 2017 tentang teknis pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi yang menjelaskan secara rinci tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi
- SOP Perizinan perusahaan, dinas sendiri sudah memiliki SOP verifikasi, yang selama ini diterapkan. Sehingga untuk CDK bisa menyesuaikan dengan SOP ini. SOP Penarikan karcis masuk belum ada, hal ini yang paling diharapkan dan menjadi fokus sehingga dapat diterapkan di kawasan-kawasan lain. SOP organisasi yang disusun oleh tim Coremap sebenarnya memang sudah dijalankan dan berlangsung lama, akan tetapi teman-teman coremap membantu dalam membukukannya dan menulisnya dalam sebuah dokumen.

c. FGD Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Gili Balu

FGD Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Gili Balu diselenggarakan pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Hotel Prime Park, Mataram. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam konsultasi tersebut yaitu:

- Perlu ditambahkan pelaksana atau penanggung jawab dalam setiap kegiatan yang di matriks rencana pengelolaan.
- Mungkin itu bisa menambahkan satu kolom lagi untuk pelaksana/penanggungjawab.

- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemanfaatan pariwisata alam perairan dimajukan. Sebelumnya direncanakan akan dilakukan tahun 2023 tapi dimajukan menjadi tahun 2022.
- Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitran dijadikan setiap tahun, yang sebelumnya dilakukan setup 2 tahun sesuai kegiatan pelaksanaan kemitraannya.

d. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal dalam Pembuatan Paket Wisata Bahari di Gili Balu

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Dalam Pembuatan Paket Wisata Bahari diselenggarakan pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Kantor COREMAP-CTI GP3, Desa Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Pelatihan yang dilakukan menghasilkan beberapa contoh paket wisata yang dapat dilaksanakan di Gili Balu dan Sekitarnya yaitu:

- Paket wisata darat Desa Poto Tano dan desa sekitarnya, yaitu paket 2 Hari 1 malam Camping kenawa dan 2 hari 1 malam Mantar Poin.
- Paket pengalaman snorkeling dan diving untuk menyaksikan keindahan dan keragaman terumbu karang dan ikan laut Gili Balu.
- paket wisata Gastronomi Poto Tano berupa Paket 1 Day Cooking Class Kenawa dan 2 Day Unforgettable Poto Tano. Paket wisata ini menawarkan pengalaman memasak masakan khas Poto Tano dan mengenal Budaya masyarakat Poto Tano yang unik.

e. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Pemanduan Wisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata Laut Yang Ramah Lingkungan

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Pemanduan Wisata dan Pengelolaan Destinasi Wisata Laut Yang Ramah Lingkungan diselenggarakan pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Kantor COREMAP-CTI GP3, Desa Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Pelatihan yang dilakukan meliputi:

- role play mengenai pemandu wisata dan wisatatawan
- peserta diminta untuk mempromosikan paket yang ada di akun masing-masing,

Sebagai tindak lanjut dibutuhkan pelatihan berbahasa asing, kolaborasi paket, branding destinasi wisata, keamanan dan kenyamanan wisatawan, pengadaan bank sampah, dan lebih banyak pelibatan peran perempuan dalam industri pariwisata.

f. Konsultasi Publik Revisi 3 SOP

Konsultasi Publik II (Revisi) 3 SOP Prioritas Taman Wisata Perairan Gili Balu diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal Rabu 2 Maret 2022 di Hotel Ashton in, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, BAPPENDA NTB, KPHG Rinjani Timur, Dinas Pariwisata NTB, akademisis 45

Mataram dan Wildlife Conservation Society (WCS) Wilker NTB dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Wilker NTB, Dinas Perikanan Sumbawa Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sumbawa Barat, Popsus Perikanan Poto Tano, JARI NTB, Pokmaswas, dan Pokdarwis, Sekitar Gili Balu. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam konsultasi publik tersebut yaitu:

- DKP NTB (Pemda NTB) berada dipersimpangan satu sisi pasal 27 UU no 23 tahun 2014 tentang peraturan pemerintah daerah adalah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola ruang laut 0-12 mil, termasuk Kawasan konservasi. Sedangkan di dalam UU no 28 tahun 2009, Daerah hanya diberikan 2 kewenangan saja yaitu usaha perikanan dan Kegiatan penangkapan ikan. Jadi disatu sisi diberi kewenangan mengelola 0-12 mil laut, tapi disisi lain juga dibatasi.
- Diperlukan Dasar hukum yang jelas dalam melakukan penarikan karcis masuk di TWP Gili balu karena UU 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pungutan retribusi terkait pariwisata itu tidak masuk dalam retribusi dinas perikanan, yang masuk retribusi perikanan itu hanyalah bidang budidaya dan bidang tangkap.
- Karena Gili Balu saat ini adalah kewenangannya DKP Provinsi dan di sana sudah ada kantor CDK, jika ingin melakukan pemungutan retribusi sudah ada retribusinya melalui tiket masuk.
- Penarikan retribusi karcis akan masuk ke dalam kas daerah yang kemudian diatur penggunaannya.
- Tugas pengawasan itu tidak hanya dibebankan ke Pokmaswas karena di Gili Balu banyak sekali instansi yang terkait ikut dalam melakukan kegiatan pengawasan di Gili Balu. Perlu diatur strategi Kerjasamanya seperti apa, sehingga pelaksanaan pengawasan ini lebih maksimal.



Gambar 1.B.10 Konsultasi Publik 3 SOP

g. Koordinasi 3 SOP Prioritas

Koordinasi 3 SOP Prioritas Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di Aula Dapoer Sasak, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam koordinasi tersebut yaitu:

- Ketiadaan Dasar Hukum Penarikan retribusi karcis masuk di TWP Gili Balu selain itu CDK dan Dinas tidak memiliki kewenangan dan Tupoksi dalam mengambil karcis masuk kawasan
- SOP Karcis tidak dapat diteruskan kecuali menggunakan mekanisme BLUD
- Penarikan sumber pendapatan pembiayaan untuk pengelolaan dapat menggunakan 2 cara yaitu Sumbangan pihak ketiga dan penerapan sistem BLUD oleh CDK Sumbawa-Sumbawa Barat



Gambar 1.B.11 Koordinasi 3 SOP Prioritas

h. Koordinasi Mooring Buoy

Koordinasi verifikasi pemasangan mooring buoys dilakukan oleh DKP NTB bersama Ditjen ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengesahkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut Kawasan Konservasi Perairan (PPRLKKP) pada tanggal 16 Maret 2022 dan menghasilkan berbagai revisi khususnya luasan kebutuhan ruang laut yang digunakan dalam pemasangan Mooring Buoys di TWP Gil Balu hingga saat ini revisi telah dikirim kepada Ditjen PRL untuk ditinjau kembali.

i. Terlaksananya Workshop pembahasan hasil Studi WTP

Workshop Pembahasan Hasil Survey WTP Taman Wisata Perairan Gili Balu diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di Hotel Ashton in, Mataram dan dihadiri oleh Perwakilan Kepala Dinas DKP NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP NTB dan Seksi yang ada dibawahnya, Cabang Dinas Kelautan Regional Sumbawa-Sumbawa Barat, akademisis Universitas Mataram dan 45 Mataram dan Wildlife Conservation Society (WCS) Wilker NTB dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Wilker NTB, Dinas Perikanan Sumbawa Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sumbawa Barat, Polsus Perikanan Poto Tano, Desa, Pokmaswas, dan Pokdarwis Sekitar Gili Balu. Beberapa catatan penting yang dihasilkan dalam workshop tersebut yaitu:

- Diperlukan proses penarikan karcis yang menyeluruh karena terdapat pemda kabupaten
- Pembagian wewenang harus didiskusikan secara jelas sehingga setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan kawasan
- Penentuan WTP masuk kawasan ditetapkan sesuai kondisi masyarakat karena harga yang terlalu mahal dapat menghambat masyarakat untuk kembali berkunjung.
- Hal yang patut diperhatikan adalah penentuan WTP harus memperhatikan pengunjung yang juga membayar transportasi dan akomodasi untuk masuk kawasan.



Gambar 1.B.12 Wokshop Studi WTP

2. Support for Ecosystem-based Resource Management Plans and Sustainable Marine-based Livelihoods

PAKET KEGIATAN 4

Coral Triangle Center

a. *Soil Test* – Sondir tanah untuk pembangunan infrastruktur Pos Pengawasan di Batununggul serta Mangrove tracking dan Bird Watching Tower

CTC mendampingi tim konsultan untuk melaksanakan sondir (soil test) di Desa Batununggul untuk pembangunan Pos Pengawasan dan di Pulau Nusa Ceningan untuk pembangunan *Tracking* mangrove dan *Bird Watching Tower*. Survei kondisi struktur tanah diperlukan untuk memastikan struktur pondasi bangunan menyesuaikan dengan kondisi kekuatan tanah di masing-masing lokasi pembangunan. Masing-masing lokasi pembangunan dilakukan dua kali tes di dua titik yang berbeda.



Gambar 1.B.13 Soil test di Nusa Ceningan

b. Kunjungan ke Kantor Media dan Dinas Informasi dan Kehumasan Wilayah Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung

CTC melakukan kunjungan singkat dan rapat koordinasi dengan sepuluh media berbasis Bali, Diskominfo Provinsi Bali dan Diskominfo Kabupaten Klungkung, pada tanggal 24 dan 25 Januari 2022. Dalam pertemuan tersebut, CTC memperkenalkan kembali visi dan misi organisasi dan proyek COREMAP-CTI saat ini di Nusa Penida yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan berjalan hingga September 2022. Selain itu Dari kegiatan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove di Nusa Penida, CTC menekankan pemulihan mata pencaharian yang menasar petani dan pengolah rumput laut perempuan setelah terkena dampak pandemi global virus corona selama dua tahun terakhir. CTC juga membagikan beberapa media kit dan flyer sebagai referensi.

Partisipasi dan kolaborasi dari pemerintah daerah dan media sangat penting untuk mendorong pengembangan produk rumput laut lokal dan mendorong ekonomi biru. CTC akan memfasilitasi kunjungan media menjelang fase akhir proyek COREMAP-CTI, yang memungkinkan jurnalis dan pejabat pemerintah untuk mengamati dan meliput dampak positif bagi anggota masyarakat pesisir. Semua perwakilan pemerintah dan media menyambut baik CTC dan menunjukkan dukungan penuh mereka terhadap proyek COREMAP-CTI. Diperlukan komunikasi lebih lanjut antara CTC dan media untuk menyebarkan informasi kepada publik.

c. Pertemuan Masyarakat dan Koordinasi Persiapan Implementasi Rehabilitasi Terumbu karang dan Mangrove di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida

Pertemuan masyarakat dan koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 Februari 2022 berlokasi di Nusa Penida dan Lembongan bertujuan untuk memfinalisasi rencana kerja, metode dan jenis struktur yang digunakan pada program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di KK Nusa Penida. Pertemuan dilaksanakan dengan kelompok mitra yang akan jadi pelaksana program dan berdasarkan hasil pertemuan tersebut kami menyepakati beberapa kesepakatan diantaranya adalah:

- Metode dan jenis rehabilitasi yang akan digunakan
- Skema pembelanjaan alat dan bahan
- Jumlah tenaga kerja/masyarakat yang akan terlibat
- Lokasi pembuatan bedeng mangrove
- Proses pembibitan mangrove
- Alokasi waktu pengerjaan

d. Pelatihan Pembuatan Sedotan dan Kemasan Berbahan Dasar Rumput Laut di KKP Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, provinsi Bali

Pelatihan pembuatan sedotan dan kemasan berbahan dasar rumput laut ini dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 22-23 Februari 2022. Pelatihan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil tes sebesar 24,67 poin, dari 58,67 poin pada tes awal menjadi 83,33 poin pada tes akhir. Pelatihan ini berfokus pada keterampilan pembuatan produk dari bahan dasar rumput laut sehingga perlu dilakukan pengukuran peningkatan keterampilan peserta.

Hasil asesmen mandiri menunjukkan perubahan positif berupa peningkatan keterampilan dalam membuat produk baru dari bahan dasar rumput laut. Pengukuran dilakukan menggunakan asesmen mandiri yang diisi oleh peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Pada awal pelatihan terdapat 9 orang yang menyatakan belum memiliki kemampuan dan 4 orang menyatakan tidak terampil. Setelah mendapat materi dan praktik latihan selama dua hari, terdapat penambahan jumlah peserta yang menyatakan terampil. Hal yang sama ditemukan di tiga kategori keterampilan lainnya, terdapat 1 orang yang menyatakan sangat terampil membuat sedotan dari bahan dasar rumput laut setelah mengikuti pelatihan.



Gambar 1.B.14 Praktik pembuatan sedotan oleh peserta pelatihan

e. Pelatihan Rehabilitasi dan Pemanfaatan Terumbu Karang & Mangrove

CTC mendukung penyiapan sumber daya manusia (SDM) di Nusa Penida untuk melakukan kegiatan pengelolaan melalui Pelatihan Pemanfaatan, Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu karang di KKP Nusa Penida. Pelatihan ini dilaksanakan di Kuta, Kabupaten Badung dari tanggal 9 sampai 13 Maret 2022 yang dihadiri 28 peserta terdiri dari dua puluh laki-laki dan delapan perempuan. Peserta berasal UPTD KKP Bali, Pokmaswas dari Lembongan, Suana, dan Buleleng, Komunitas Mangrove Nusantara, Kelompok Wanita Tani (KWT) Segara Caksu, Pencinta Hutan Mangrove Surya Mandiri, Satya Posana Nusa, and Mahasiswa dari Universitas Dhyana Pura.

Lima topik yang diajarkan dalam pelatihan ini terdiri dari (1) prinsip-prinsip kawasan konservasi perairan (KKP), (2) ekosistem laut dan pesisir, (3) pengetahuan dasar teknik rehabilitasi mangrove, (4) pengetahuan dasar teknis rehabilitasi terumbu karang, (5) pemanfaatan mangrove sebagai mata pencaharian alternatif. Pelatihan terdiri sesi kelas dan praktik lapangan. Pelatihan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil tes sebesar 17,14 poin, dari 68,57 poin pada tes awal menjadi 85,71 poin pada tes akhir.

Peserta menyampaikan masukan dari Pelatihan melalui evaluasi pelatihan. Masukan utama adalah:

- Melibatkan lebih banyak peserta dari kalangan pemuda.
- Menambahkan lebih banyak sesi praktik lapangan.
- Mengatur transportasi ke lokasi pelatihan oleh tim CTC

Masukan tersebut akan menjadi rekomendasi untuk pelatihan selanjutnya. Rekomendasi lainnya adalah pelatihan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove dilaksanakan terpisah agar peserta dapat lebih fokus ke satu ekosistem.



Gambar 1.B.15 Pelatihan Rehabilitasi dan Pemanfaatan Terumbu Karang & Mangrove

PAKET KEGIATAN **5**

PT Duta
Cipta Mandiri
berkonsorsium
dengan PT Cakra
Buana Aghna,
PT Ciriajasa
Engineering, dan
Yayasan Ekosistem
Gili Indah/Gili
Eco Trust

a. Restorasi dan Rehabilitasi Setidaknya 5% Kawasan yang Terdegradasi di Terumbu Karang Melalui Metode yang Tepat

Progress kemajuan kegiatan rehabilitasi terumbu karang ditekankan pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan stakeholder TWP Gili Matra akan pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang. Program ini bertujuan membuka mindset masyarakat di sekitar ekosistem tersebut dalam memandang ekosistem terumbu karang tidak hanya sebagai salah satu atraktan kegiatan pariwisata, namun juga sebagai salah satu tonggak keseimbangan yang menopang kehidupan masyarakat TWP Gili Matra.

Selain itu, program kegiatan yang diangkat sebagai gambaran progress rencana rehabilitasi adalah peningkatan kapasitas masyarakat akan pengetahuan tentang manajemen kegiatan rehabilitasi dan restorasi

ekosistem terumbu karang yang terdegradasi. Hal tersebut sangat penting dilaksanakan untuk meminimalisir kegagalan upaya rehabilitasi dan restorasi yang selama ini sering terjadi di Kawasan TWP Gili Matra. Kegiatan kapasitas masyarakat tentang ekosistem terumbu karang yang telah dilaksanakan pada bulan Januari adalah Workshop Identifikasi Stressor Lokal dan Global Ekosistem Terumbu Karang TWP Gili Matra. Kegiatan ini merupakan wadah diskusi antara masyarakat dan stakeholder terkait mengenai bentuk ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh ekosistem terumbu karang di kawasan TWP Gili Matra.

b. Perlengkapan Minimal untuk 3 Kelompok Masyarakat untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Gili Matra Berbasis Perikanan Terumbu Karang yang Berkelanjutan Termasuk Ikan Kakap

Pada hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022, bertempat di Ruang Meeting Hotel Royal Singosari Gili Air, telah dilakukan Workshop Pengembangan Alternatif Usaha (Livelihood) Berbasis Komoditas Ikan dalam rangka menyampaikan hasil analisis potensi sumber daya ikan, potensi jenis olahan

ikan, serta kajian cepat feasibility study usaha pengolahan ikan di Kawasan Gili Matra. Selain itu, pada workshop ini juga akan dilakukan kesepakatan dengan kelompok pengolah dan pemasar ikan di Kawasan Gili Matra terkait jumlah bahan baku ikan serta kemampuan produksi olahan ikan untuk satu kali proses pengolahan. Jenis olahan ikan yang potensial di Kawasan Gili Matra adalah abon ikan, bakso ikan, kerupuk ikan. Jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku pada ketiga jenis olahan tersebut adalah seluruh jenis ikan yang didaratkan di Kawasan Gili Matra.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 bulan Januari tahun 2022, bertempat di Ruang Meeting Hotel Royal Singosari Gili Air, telah dilakukan Workshop Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab dalam rangka menyampaikan hasil analisis potensi sumber daya ikan, potensi jenis olahan ikan, serta kajian cepat feasibility study usaha pengolahan ikan di Kawasan Gili Matra. Selain itu, pada workshop ini juga akan dilakukan kesepakatan dengan kelompok nelayan di Kawasan Gili Matra terkait dengan kesediaan kelompok nelayan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan kelompok pengolah dan pemasar ikan. Harapannya, kelompok nelayan bersedia memenuhi kebutuhan ikan untuk diolah oleh kelompok pengolah dan pemasar ikan. Kegiatan workshop ini diakhiri dengan diskusi menyepakati beberapa hal yang harus dilakukan oleh kelompok nelayan di Kawasan Gili Matra.

c. Koordinasi dengan Otoritas Pemerintah Daerah Selama Pelaksanaan Proyek Dipertahankan

i. FGD Penentuan Jumlah Pokmaswas TWP Gili Matra

Pokmaswas di TWP Gili Matra secara kelembagaan telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi namun, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pokmaswas tersebut masih sangat minim karena keterbatasan sarana dan prasarana. Sehingga program COREMAP-CTI ADB diharapkan dapat memfasilitasi pokmaswas dalam usaha meminimalisir keterbatasan tersebut melalui komunikasi dan koordinasi antara Pokmaswas dengan Pemerintah Daerah setempat.

Kegiatan Koordinasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan justifikasi resmi dari stakeholder terkait berupa berita acara kesepakatan untuk menyamakan persepsi pentingnya pembentukan satu pokmaswas dalam lingkup pengawasan di Desa Gili Indah. Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat koordinasi, maka disepakati beberapa syarat pokmaswas yang mendapatkan pelatihan dan fasilitas bantuan. Hasil kesepakatan tersebut mengarahkan justifikasi bahwa hanya ada satu pokmaswas yang layak untuk difasilitasi melalui program COREMAP GP5 yaitu Pokmaswas Gili Matra.

ii. FGD Penentuan dan Penunjukan Lahan Pembangunan Pos Pengawasan TWP Gili Matra

Dari hasil FGD didapatkan bahwa lokasi pembangunan pos pengawasan yang akan dibangun di Gili Trawangan harus mendapatkan persetujuan serta izin dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Utara. Untuk itu melalui program COREMAP-CTI ini akan dilaksanakan Diskusi lanjutan untuk membahas penunjukkan lokasi Pembangunan Pos Pengawasan TWP Gili Matra. Pembangunan Pos Pengawasan TWP Gili Matra ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendukung kegiatan pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan di Kawasan TWP Gili Matra. Setelah diskusi lanjutan dilaksanakan, didapatkan beberapa kesepakatan dengan beberapa

poin penting. Poin yang pertama adalah Pemerintah daerah melalui BPKAD Kabupaten Lombok Utara bersedia menerima dan mengelola bangunan pos pengawasan yang ada di Gili Matra. Poin kedua perlu segera dilakukan survei lanjutan untuk menentukan lokasi tepat dimana bangunan pos pengawasan akan dibangun bersama TKPRD dan BPN Lombok Utara.

iii. Survei Lokasi Lahan Pembangunas Pos Pengawasan TWP Gili Matra

Berdasarkan hasil FGD Penentuan dan Penunjukan Lahan Pembangunan Pos Pengawasan TWP Gili Matra bersama TKPRD yang dilaksanakan sebelumnya, maka dilaksanakan kegiatan Survei Lokasi Lahan Pembangunas Pos Pengawasan TWP Gili Matra. Hasil survei tersebut telah menunjuk 3 lokasi alternatif yang akan dijadikan lokasi pembangunan pos pengawasan. Tiga lokasi alternatif tersebut selanjutnya akan ditelusuri status kepemilikan dan pemanfaatan lahannya oleh pihak BPN Lombok Utara yang juga mengikuti kegiatan survei tersebut. Selain itu, dari hasil survei tersebut juga disepakati beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan tim COREMAP-CTI GP5 berdasarkan hasil diskusi dan rekomendasi dari Tim TKPRD dan Pemerintah Desa. Kegiatan tersebut adalah sosialisasi rencana pembangunan pos pengawasan kepada masyarakat Desa Gili Indah dan stakeholder terkait.

d. Workshop Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan TWP Gili Matra

Output dari kegiatan Workshop ini adalah memberikan informasi dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia serta lesson learned dan best practice yang sudah didokumentasikan kepada BKKPN Wilker Gili Matra, Pokmaswas, Pokdarwis, perangkat desa, serta stakeholder terkait yang terlibat dalam kegiatan restorasi/rehabilitasi serta pengelolaan Kawasan TWP Gili Matra. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk memonitor atau memantau usaha-usaha rehabilitasi/restorasi yang sedang atau akan dilakukan di KKP terutama Gili Matra.

e. FGD Penentuan Biaya Investasi dan Operasional Peralatan Penangkapan Ikan dan Peralatan Diving di Kawasan TWP Gili Matra.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi tentang detail biaya investasi dan operasional kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan TWP Gili Matra. Selain itu untuk menggali informasi tentang detail biaya investasi dan operasional peralatan untuk kegiatan wisata diving (menyelam) yang digunakan oleh dive operator di TWP Gili Matra. Dari hasil kegiatan tersebut diketahui bahwa terdapat 27 jenis ikan yang menjadi target penangkapan di kawasan TWP Gili Matra. Ikan-ikan tersebut memiliki kelimpahan serta nilai jual yang berbeda-beda. Rata-rata harga jual ikan sebesar Rp. 26.963. Sehingga total penerimaan dalam 1 bulan sebesar Rp. 30.538.052, dan Rp. 366.456.626 dalam 1 tahun.

Dari hasil kegiatan FGD Penentuan Biaya Investasi dan Operasional Peralatan Diving di kawasan TWP Gili Matra, diketahui terdapat 23 komponen biaya untuk investasi kegiatan wisata diving dengan nilai sebesar Rp. 347.600.000,-. Sedangkan, untuk operasional kegiatan wisata diving terdiri dari 6 komponen dengan nilai sebesar Rp. 15.765.000,-.



Gambar 1.B.16 FGD Penentuan Biaya Investasi dan Operasional Peralatan Penangkapan Ikan dan Peralatan Diving

f. Survei Ekosistem Terumbu Karang Untuk Kajian Daya Dukung Wisata Selam Di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra

Kegiatan Pengambilan data dilakukan pada tanggal 1-9 Maret 2022 di TWP Gili Matra. Penelitian ini terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama yaitu pengumpulan data sekunder seperti sarana dan prasarana yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Tahap kedua berupa pengumpulan data primer untuk kondisi ekosistem terumbu karang di lokasi wisata selam, luasan habitat karang yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata selam dan dampak kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan mengikuti kegiatan operator selam yang berada di TWP Gili Matra, sedangkan untuk lokasi penelitian berada di Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Gili Matra. Hasil dari penelitian ini terdapat pada laporan hasil survei (terlampir). Secara umum, kompleksitas habitat di perairan TWP Gili Matra pada perairan yang dimanfaatkan untuk wisata selam cenderung memiliki kontur rata dimana tidak banyak dijumpai gua atau celah-celah sebagai tempat berlindungnya ikan karang. Lokasi-lokasi wisata selam perlu didorong dengan melaksanakan upaya-upaya proaktif untuk menjaga atau meningkatkan kondisi habitat sumberdaya ikan dalam kawasan dengan cara melakukan rehabilitasi lokasi terumbu karang yang mengalami kerusakan serta perbaikan tata kelola perikanan dan pariwisata seperti pengaturan jumlah dan ukuran tangkap ikan, penambahan muring buoy, pengaturan jumlah kunjungan berdasarkan jumlah maksimal kapasitas daya dukung menggunakan satuan kapal atau jumlah orang. Kegiatan rehabilitasi terumbu karang seperti penambahan struktur vertikal buatan di lokasi-lokasi yang tepat juga dapat membantu menciptakan tempat hidup dan berlindung atau shelter untuk ikan-ikan target demersal, juga menyediakan tempat penempelan baru bagi larva-larva karang yang mendukung perbaikan ekosistem terumbu karang di TWP Gili Matra 2.

g. Penyusunan SOP Pelatihan Ekowisata

Kegiatan penyusunan ini dilakukan di kantor BKKPN Kupang wilker Gili Matra pada tanggal 10-11 Maret 2022. Diskusi ini dihadiri oleh BKKPN Kupang TWP Gili Matra, dan Tim Ahli kegiatan coremap GP2. Diskusi ini membahas tentang penyusunan SOP Pelatihan Ekowisata dan selam serta waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya. Adapun hasil dan tindak lanjut dari diskusi ini sebagai berikut:

- a. Perlu ada justifikasi kenapa alat diberikan ke pokdarwis dan perlu ada kesepakatan tertulis terkait serah terima alat
- b. Persyaratan peserta perlu disesuaikan
- c. Perlu dilakukan FGD untuk penyusunan SOP pelatihan ekowisata
- d. Sebaiknya pelatihan dilaksanakan langsung
- e. Saran pemateri dari dispar adalah pak Rahman torihini dan perlu ada anggaran 3.

h. Pelatihan Ekowisata

Pelatihan ini dilakukan secara daring dan luring pada tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Royal Singosari, Gili Trawangan. Diskusi ini dihadiri oleh Bappenas, ICCTF, PC Coremap GP2, Tim Ahli kegiatan coremap GP2, dan 20 orang peserta Ekowisata (absen terlampir). Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD), dimana pada metode ini para peserta akan diberikan pematerian dan pelatihan dari para narasumber. Sebelum materi diberikan oleh masing-masing narasumber, peserta diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pengetahuan dari peserta pelatihan. Terdapat tiga kategori materi yang diberikan oleh narasumber yaitu sebagai berikut:

- BKKPN Kupang memberikan materi tentang peraturan dan pengelolaan wisata di wilayah perairan konservasi di Gili Matra
- Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara memberikan materi tentang program strategis dispar bidang pariwisata dan kaitannya tentang dukungan dan sinergi ke kegiatan ekowisata
- Pemateri Umum memberikan materi tentang ekowisata secara umum, ekowisata Hiu dan penyerta ekosistem terumbu karang, Code of Conduct sebagai pemandu wisata bahari hiu dan penyu

Hasil dari pelatihan ekowisata ini adalah Peserta dapat mengerti tentang peraturan dan pengelolaan wisata di wilayah perairan konservasi di Gili Matra, Peserta mengetahui terkait program strategis dispar bidang pariwisata dan kaitannya tentang dukungan dan sinergi ke kegiatan ekowisata, Peserta memahami konsep ekowisata secara umum, ekowisata Hiu dan penyerta ekosistem terumbu karang, Code of Conduct sebagai pemandu wisata bahari hiu dan penyu, dan Peserta dapat mengimplementasikan seluruh materi yang telah diberikan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, peserta akan tetap didampingi.

a. Patroli Pokmaswas

Tim GP6 terus berkoordinasi dengan Pokmaswas selaku mitra dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan. Sejak awal Januari 2022 Pokmaswas telah melakukan patroli rutin dan pengintaian terhadap pelaku *destructive fishing*. Hasil dari patroli dan pengintaian oleh Pokmaswas tersebut didapatkan pelaku penangkapan ikan menggunakan bom. Pelaku *destructive fishing* di Pulau Belang berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa beberapa botol alat pengeboman.



Gambar 1.B.17 Pengeboman di Pulau Belang (pelaku berhasil ditangkap)

b. Monitoring Mangrove

Terkait monitoring dan penyulaman mangrove di Pulau Namo dan Pulau Kalong yang berkoordinasi dengan LOH dan masyarakat setempat, kondisi bulan Januari mengalami angin barat dengan gelombang yang cukup kuat sehingga dapat mengganggu pertumbuhan mangrove, rata-rata yang berada di pesisir utara. Pengukuran tinggi mangrove beserta lembar daun dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan. Area sekitar lahan lingkungan mangrove yang juga banyak sampah yang terbawa arus yang dapat mengganggu pertumbuhan mangrove.



Gambar 1.B.18 Monitoring mangrove

a. Kegiatan Survei

Sepanjang Bulan Januari 2022, Paket Kegiatan 7 melakukan 3 kegiatan survei, yaitu:

- a. Survei biofisik rumput laut di KKP Nusa Penida dan Terumbu Karang dan Ikan Demersal (Snapper) di KKL Gili Matra dan KKL Gili Balu. Kegiatan survei dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 28 Januari 2022.
- b. Survei oseanografi dan kualitas air di Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Kegiatan survei dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 28 Januari 2022.



Gambar 1.B.19 Pengambilan sampel air di Nusa Penida

- c. Survei Lapangan komoditas rumput laut untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Rote. Kegiatan survei dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 28 Januari 2022.

b. Survei sosial ekonomi perikanan tuna di Pelabuhan Benoa Bali

Kegiatan survei dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Tujuan kegiatan adalah untuk memperoleh informasi dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait perikanan tangkap tuna rawai pada lokasi penelitian. Informasi dan data tersebut dapat mendukung analisis model bioekonomi, ITQ dan rantai pasok. Selain itu, kegiatan survei ini juga bertujuan untuk menggali informasi terkait isu-isu strategis dan isu-isu yang ada di tingkat tapak, sehingga informasi ini juga berguna sebagai masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan agar sejalan dengan pemenuhan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan target SDG14. Kegiatan survei dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap nakhoda, pengurus perusahaan dan pemilik perusahaan. Pada kegiatan ini berhasil diwawancarai 18 Responden yang terdiri dari 13 nakhoda, 4 pengurus perusahaan dan 1 pemilik perusahaan.



Gambar 1.B.20 Koordinasi Tim Kajian Tuna dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia

c. Survei pelingkupan profil dan rantai pasok perikanan kakap merah di Provinsi NTT, NTB, dan Bali

Tujuan pelingkupan profil dan inisiatif pengelolaan perikanan kakap merah adalah untuk memperoleh informasi dasar mengenai profil perikanan kakap merah (komoditas, lokasi pusat perikanan, teknologi penangkapan, dan kapasitas penangkapan); memahami kondisi sumber daya ikan, alat tangkap, daerah penangkapan ikan, sarana-prasarana, dan kelembagaan perikanan kakap merah; memahami pola penangkapan perikanan kakap merah; memahami rantai pasok dan pasar produk perikanan kakap merah, dan identifikasi inisiatif pengelolaan perikanan kakap merah yang sedang dilaksanakan. Adapun tujuan dari pelingkupan rantai pasok perikanan kakap merah adalah untuk memperoleh informasi dasar mengenai gambaran dan peta jalur rantai pasok komoditi perikanan kakap merah di tingkat lokal dan ekspor; mengidentifikasi pelaku/stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok kakap merah; mengidentifikasi aspek sosial dan ekonomi dalam rantai pasok perikanan kakap merah.



1.B.21 Perlakuan tuna yang akan diekspor yang meliputi pembersihan isi perut, pemotongan sirip kaudal dan ekor, dan pemotongan kepala

d. Survei Lapangan komoditas rumput laut untuk wilayah Nusa Tenggara Barat

Kegiatan survei dilaksanakan dari tanggal 17 Februari sampai dengan 28 Februari 2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan first-hand information dengan pendekatan semi-structure interview kepada para aktor dalam rantai pasok rumput laut. Target responden diklasifikasi menjadi tiga kelompok, mulai dari produsen, perantara sampai kepada industri. Kegiatan survei dilaksanakan di sentra budidaya rumput laut di Seriwe Kabupaten Lombok Timur dan di Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa.



Gambar 1.B.22 Wawancara Pedagang Ikan Kakap Merah di Arah Jalan Menuju PPI Tulandale, Rote Ndao



Gambar 1.B.23 Pengeringan rumput laut di Desa Sekaroh Kabupaten Lombok Timur

2. Master Degree Program

Pada triwulan 1 2022 ini, keempat mahasiswa telah berada di University of Queensland, Brisbane, Australia, untuk mengikuti perkuliahan secara offline.

C. BLENDED FINANCE



1. Rapat Kerjasama Blue Finance dengan ADB

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams. Agenda pertemuan ini terkait dengan pengadaan konsultan. Poin-poin hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Pengadaan dilakukan untuk 4 orang konsultan, terdiri dari 2 konsultan internasional dan 2 konsultan nasional.
- ADB saat ini telah menyiapkan budget senilai US\$ 100.000. Namun jumlah tersebut masih fleksibel tergantung dari profil para kandidat.
- Jangka waktu proyek untuk fase pertama sekitar 3-4 bulan setelah kandidat *on board*. Kemudian fase kedua akan dimulai setelah bulan Juli 2022.
- ICCTF telah mengalokasikan sebagian dana untuk mendukung kebutuhan travel.
- ICCTF berencana untuk mengadakan kegiatan *kick-off* meeting terkait blue bond ini.



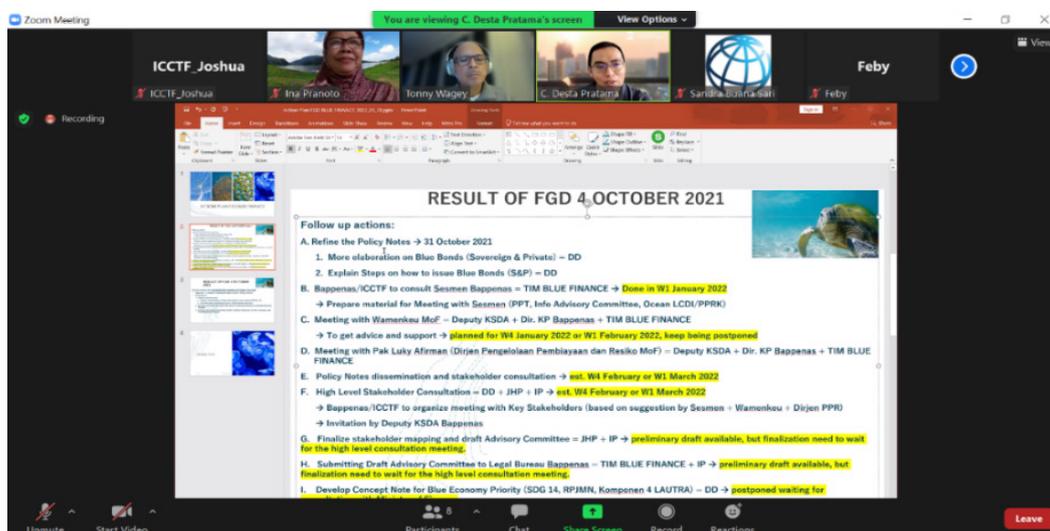
Gambar 1.C.1 Pembahasan kerjasama Blue Finance antara ICCTF dengan ADB

2. Blue Finance Team Discussion

Pada tanggal 20 Januari 2022, ICCTF menghadiri undangan World Bank untuk diskusi Team Blue Finance secara online melalui aplikasi Zoom. Poin-poin hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Problue akan menjadi pondasi “New LAUTRA” dimana akan tetap ada kegiatan komponen 3 yang akan membahas implementasi blue finance

- Roadmap Blue Finance: Pertemuan internal Bappenas (penyampaian policy notes & advisory committee) → penyampaian ke Kemenkeu (sebelum ke Wamen, ke Pushaka dulu)
- Sebelum legal (SK) perlu komunikasi dan konfirmasi dengan para kontributor (member)



Gambar 1.C.2 Diskusi Team Blue Finance dengan ADB

3. Rapat Blue Finance

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022, bertempat di hotel Mandarin, Jakarta. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah pembahasan blue bonds. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Disepakati “pintu masuk” Blue Bonds adalah SDGs, khususnya SDG-14.
- Fokus SDGs tahun ini dan ke depan:
 1. Menindaklanjuti kesepakatan dari COP26 yang focus pada aspek perubahan iklim. Dalam hal ini terdapat Goal 14 yang terkait juga dengan Goal 13 dll
 2. Mengembangkan SDGs Connecting Hub, tinggal menyiapkan projectnya. Saat ini sudah banyak namun skala masih kecil. Perlu membuat project yang cukup besar, contohnya mengambil focus pada Indonesia bagian timur dari Hulu (Kawasan yang memiliki potensi SDA) sampai Hilir (Pelabuhan, Industri Pengolahan). Dari hal ini dapat dibagi-bagi pendanaannya.
- Per-Desember 2021, Kemenkomarves sudah circulating Blue Finance Strategy yang memuat Blue Economy Sectors. Namun dokumen Kemenkomarves masih konsep.
- Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam dokumen adalah terkait eligible criteria dan menghitung dampak terkait estimasi karbon dan sebagainya karena belum ada yang punya terkait ini

- Grading in term of sectors bisa ditambahkan jika ingin focus pada blue economy.
- Kerja sama dengan intermediary perlu dikembangkan untuk memastikan impact investment.
- Sebagai tindak lanjut, ToR perlu segera diselesaikan dan mempersiapkan pipe line investasi (SDGs Bonds belum memikirkan framework yang besar).



Gambar 1.C.3 Diskusi pembahasan blue bonds

4. Blue Finance Roadmap and Introduction of the Consultant's Team

Pada tanggal 7 Maret 2022, ICCTF menghadiri undangan ADB untuk pembahasan awal terkait kerja sama BAPPENAS dan ICCTF dengan pemberi dana *blue bond* (ADB dan ACGF), perancangan *work plan*, dan pengenalan dengan tim konsultan. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Blue Finance yang ada di Indonesia merupakan faktor yang penting, dan menjadi tujuan utama yang saat ini dikembangkan di Indonesia
- Inisiasi ini merupakan bagian yang penting untuk mendapatkan tujuan bluebond bagi Indonesia
- SDGs Framework akan menjadi dokumen landasan yang akan digunakan dalam merencanakan kegiatan blue finance
- ADB document akan menjadi referensi dalam merencanakan kegiatan blue finance yang akan dirancang
- Akan dihasilkan project baru untuk mengembangkan blue finance yang akan dilaksanakan di Indonesia bersama dengan dukungan dari ADB dan ACGF

5. Pembahasan Blue Finance dengan Konsultan ADB

Pada tanggal 18 Maret 2022, ICCTF melakukan pertemuan dengan Konsultan ADB untuk mendiskusikan pembagian peran dalam kegiatan blue finance. Hasil dari kegiatan ini antara lain:

- Tugas utama dari Pak Dadang adalah untuk membantu Bu Poppy terkait informasi yang diperlukan.
- Pelaporan dapat dilaksanakan setiap weekly dan every week
- Surat dinas akan segera dikerjakan
- Pada hari Selasa siang akan dilaksanakan rapat offline di ICCTF
- Akan dibuat whatsapp group untuk ADB Consultant National
- Bu Poppy akan membuat fieldwork untuk laporan yang akan dilaksanakan

D. BLUE CARBON

1. Meeting dengan AFD

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 secara online melalui aplikasi zoom. Agenda dalam pertemuan ini adalah pembahasan tindak lanjut Facility 2050. Poin-poin hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Dalam surat Facility 2050 disebutkan akan ada studi blue carbon Likupang dan studi inequality di MPA.
- AFD membutuhkan masukan dari ICCTF terkait MPA mana yang akan dipilih untuk piloting
- Proposal ini sudah menjadi perhatian Menteri PPN. Menteri akan bersurat kepada Dubes Prancis terkait loan dan grant, kemungkinan juga ada inisiatif lain.
- Sebagai tindak lanjut, summary 2050 Facility disampaikan kepada Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, kemudian data dan peta terkait Sulawesi Utara secara keseluruhan akan digali kembali.

2. Kunjungan Blue Carbon ke Likupang

Pada tanggal 20-22 Maret 2022, ICCTF melaksanakan kegiatan kunjungan lapang ke kawasan ekosistem mangrove, di Semenanjung Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi bersama para pakar dan peneliti Mangrove dari Universitas Sam Ratulangi dan melakukan survey dan observasi lapangan terhadap potensi pengembangan Blue Carbon Program khususnya Mangrove di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Hasil dari kegiatan ini antara sebagai berikut:

a. Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Desa Bulutui

- Kawasan yang dikunjungi adalah areal mangrove yang berada di depan lahan milik Bpk. Henry seluas 3,5 Ha sepanjang 100 meter dari bibir pantai
- Dari data yang disampaikan oleh Universitas Sam Ratulangi, luas mangrove sekitar 70 Ha pada areal tersebut
- Namun berdasarkan laporan perjalanan tahun 2020, luas Kawasan mangrove di desa ini sekitar 1.473 Ha menurut data dari dinas terkait
- Kondisi Mangrove masih alami dan tidak ditemui penebangan liar. Walaupun menurut Universitas Sam Ratulangi masih terdapat kegiatan penebangan pada beberapa titik di desa tersebut

- Adanya ancaman terhadap ekosistem mangrove ini akibat semakin meningkatnya pertumbuhan dan kebutuhan penduduk, membuat tekanan terhadap lingkungan juga semakin bertambah. Oleh karena itu, perlu mendorong agar dapat dilakukan konservasi ekosistem mangrove dan dikembangkan pula mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar agar tidak merusak mangrove yang ada
- Menurut laporan sebelumnya, Pemilik Kawasan ini telah sepakat untuk mendukung apabila ada rencana untuk pengembangan Blue Carbon Program di sekitar tanah miliknya. Pemanfaatan Kawasan mangrove menjadi ekowisata dengan membangun mangrove tracking terapung atau dapat pula pemanfaatan Sebagian Kawasan sebagai hutan produksi arang mangrove yang memiliki pasar yang potensial di luar negeri yang terus dilakukan rehabilitasi secara berkelanjutan
- Dilokasi dilakukan pendokumentasian menggunakan drone untuk melihat tutupan mangrove yang ada disekitar kawasan ini

b. Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Desa Bahoi-Serai

- Kawasan yang dikunjungi adalah areal mangrove yang berada di muara Desa Bahoi-Serei dan lamun yang berada dipesisir pantainya
- Dari data yang disampaikan oleh Universitas Sam Ratulangi, luas mangrove sekitar 90 Ha dan terdapat 8 jenis lamun tetapi belum dipetakan luas tutupan lamunnya
- Kondisi Mangrove masih alami dan kerapatan mangrove cukup baik. Kondisi lamunnya juga cukup baik dan tumbuh dengan sehat
- Dilokasi ini dilakukan juga pendokumentasian menggunakan drone untuk melihat tutupan mangrove yang ada disekitar kawasan ini dan pendokumentasian lamun dengan menggunakan kamera wide angle
- Di sekitaran desa Bahoi-Serai ini terdapat beberapa penginapan atau cottage yang bisa diakses melalui darat dan juga laut
- Aktifitas masyarakat dan wisata sejauh pengamatan yang dilakukan tidak mengganggu ekosistem blue carbon.

c. Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Desa Pakutungan-Jayakarsa

- Kawasan yang dikunjungi adalah areal mangrove yang berada di muara Desa Bahoi-Serei dan lamun yang berada dipesisir pantainya.
- Dari data yang disampaikan oleh Universitas Sam Ratulangi, luas mangrove sekitar 90 Ha dan terdapat 8 jenis lamun tetapi belum dipetakan luas tutupan lamunnya
- Kondisi Mangrove masih alami dan kerapatan mangrove cukup baik. Kondisi lamunnya juga cukup baik dan tumbuh dengan sehat

- Dilokasi ini dilakukan juga pendokumentasian menggunakan drone untuk melihat tutupan mangrove yang ada disekitar kawasan ini dan pendokumentasian lamun dengan menggunakan GoPro
- Di sekitaran desa Bahoi-Serai ini terdapat beberapa penginapan atau cottage yang bisa diakses melalui darat dan juga laut
- Aktifitas masyarakat dan wisata sejauh pengamatan yang dilakukan tidak mengganggu ekosistem blue carbon



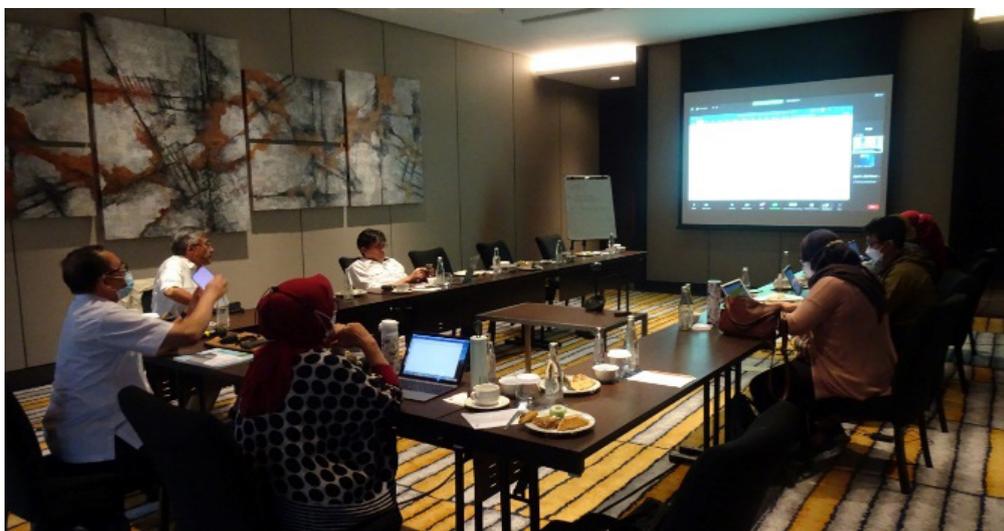
Gambar 1.D.1 Pengamatan mangrove di Desa Pakutungan-Jayakarsa, Likupang Barat

2 | Program Strategis dan Penggalangan Dana (*fundraising*)

2.1 FGD Pembahasan Potensi Wisata Bahari Kawasan Marine Protected Area

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 di Hotel Pullman, Bandung. Pembahasan yang dilakukan terkait potensi untuk membuka area/wilayah wisata baru karena pariwisata di Bali sudah masuk dalam kondisi yang stagnan. Poin-poin hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Daya dukung dan daya tampung di Pulau Bali sudah terlalu tinggi, wisatawan perlu dialirkan ke daerah Nusa Tenggara.
- Koridor-koridor peraturan yang ada menjelaskan bahwa daerah konservasi bisa dimanfaatkan untuk daerah ekowisata yang berkelanjutan
- Pemanfaatan wilayah konservasi sebagai daerah wisata sudah banyak tertuang dalam kebijakan namun masih sedikit dalam pelaksanaannya
- Daya tampung dan daya dukung di tempat wisata menjadi perhatian karena akan berpengaruh di kesehatan dan keberlangsungan wilayah konservasi
- Tantangan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan adalah bagaimana paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang hanya cost center berubah menjadi cost revenue yang dapat membiayai pengelolaan kawasan konservasi.
- Oleh karena itu perlu meyakinkan bahwa daerah konservasi yang dijadikan tempat Ekowisata maka akan menjadikan wisata tersebut premium dengan keberlangsungan sumberdaya yang ada sehingga akan timbul willingness to pay untuk menikmatinya.



Gambar 2.1 Diskusi potensi wisata bahari di kawasan Marine Protected Area

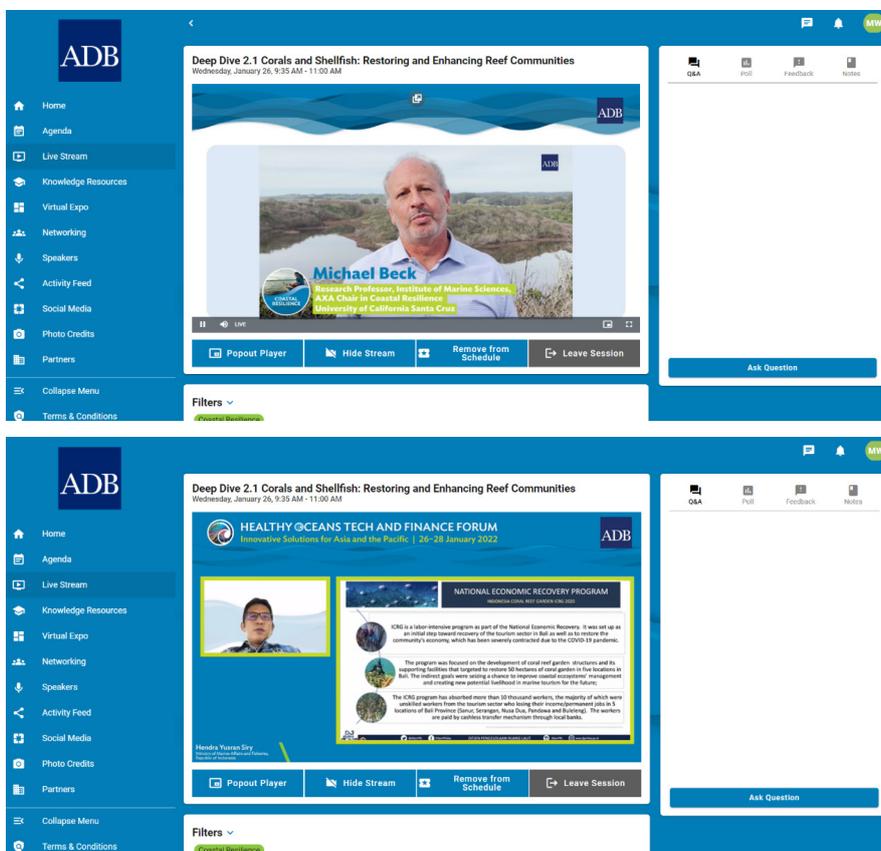
2.2 Undangan ADB pada Healthy Oceans Tech and Finance Forum

Healthy Oceans Tech and Finance Forum diselenggarakan pada tanggal 26-28 Januari 2022 oleh ADB dan dapat dihadiri oleh umum. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempromosikan dan berbagi teknologi inovatif, praktik yang baik, studi kasus, dan solusi praktis untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan dan ketahanan ekosistem laut dan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Forum pada kegiatan ini mencakup 4 tematik:

1. Lautan Bebas Plastik,
2. Ketahanan Pesisir,
3. Keuangan Laut/*Ocean Finance*, dan
4. Makanan Biru/*Blue Foods*

ICCTF menghadiri 3 diskusi yang berlangsung pada hari pertama dan kedua kegiatan. Tema yang diikuti tersebut, antara lain:

1. Corals and Shellfish: Restoring and Enhancing Reef Communities
2. Ocean and Coastal Tourism: Changing the Tide on Sustainability
3. Harnessing Ocean Risk to Innovate Ocean Finance: The Case for Parametric Insurance

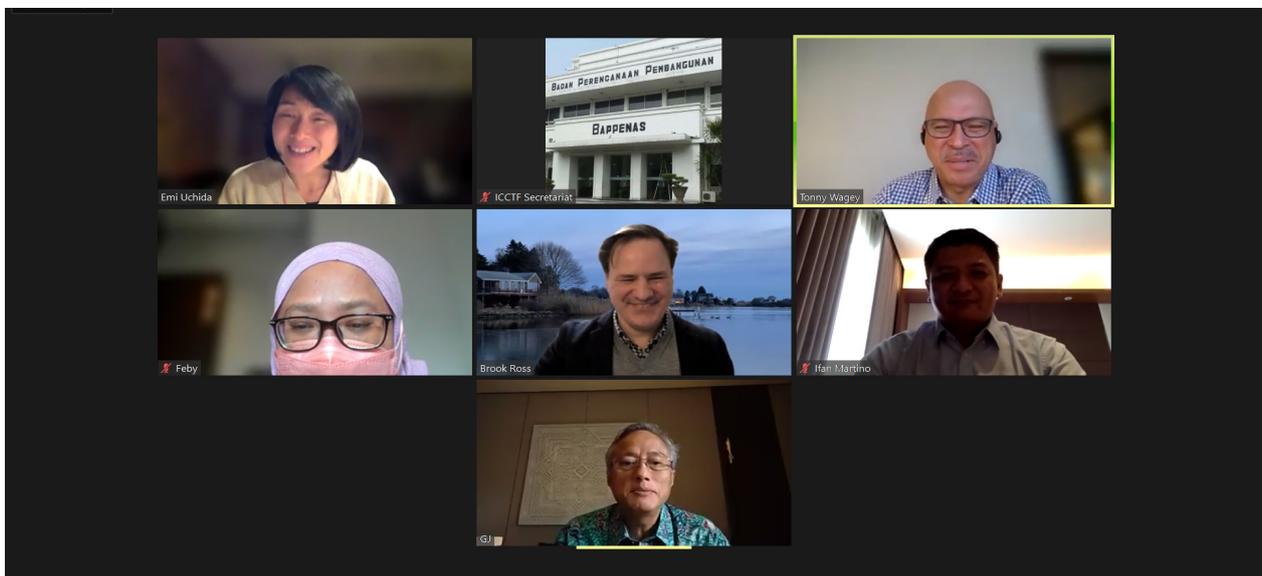


Gambar 2.2 Pemaparan oleh para Narasumber

2.3 Diskusi dengan University of Rhode Island (URI)

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini membahas tindak lanjut kerjasama dengan URI terkait research di Indonesia. Poin-poin hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan penelitian akan dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh Emi Uchida
- Ekosistem yang menjadi tujuan penelitian adalah mangrove dan coral reef
- Wilayah yang diusulkan adalah Papua Barat dan Sumatera Utara
- ICCTF merekomendasikan Likupang sebagai lokasi di Sumatera Utara
- Kegiatan penelitian diharapkan dapat bekerjasama dengan Universitas lokal seperti UNIPA dan Universitas Sam Ratulangi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dengan Universitas lain di Pulau Jawa misalnya IPB.
- Aceh diusulkan sebagai lokasi ketiga jika memungkinkan sehingga penelitian dapat merepresentasikan wilayah barat, tengah dan timur Indonesia
- Kerjasama dengan Bappeda sangat memungkinkan
- Terdapat beberapa NGO lokal di wilayah *project* tetapi disarankan agar lebih mengutamakan kerjasama dengan universitas di tahap awal

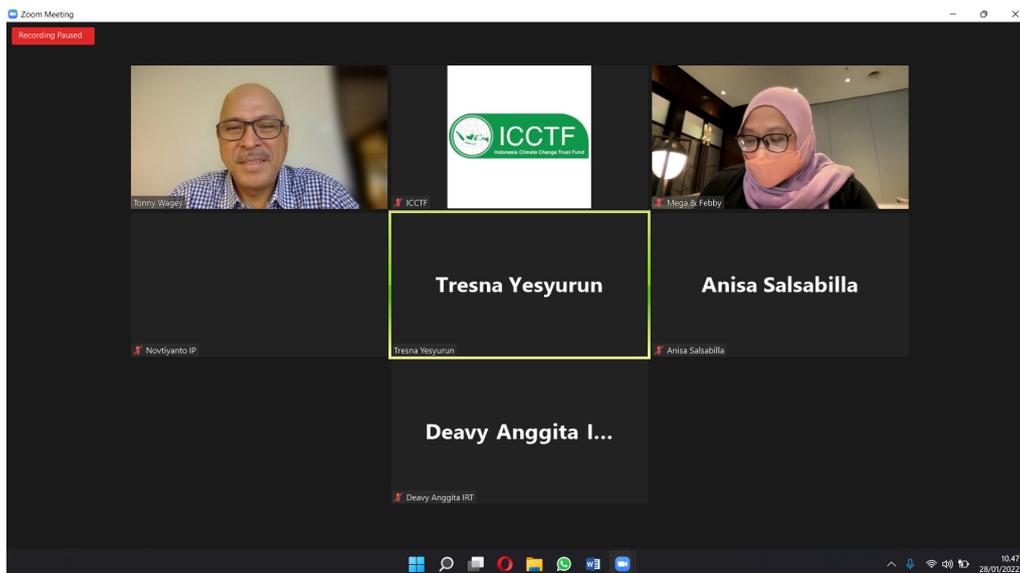


Gambar 2.3 Diskusi dengan perwakilan URI

2.4 Rapat Coral Transplantation dengan PT. Indo Raya Tenaga

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda pertemuan ini membahas rencana kerjasama ICCTF dengan PT. Indo Raya Tenaga dalam kegiatan Coral Transplantation. Poin-poin hasil dari pertemuan ini antara lain sebagai berikut:

- PT. Indo Raya Tenaga adalah perusahaan yang mengerjakan konstruksi PLTU Jawa 10 secara onshore dan offshore
- Sebagai biodiversity offset, PT. Indo Raya Tenaga berkewajiban melakukan restorasi 34 ha di Pulau Tunda, Banten
- PT Indo Raya Tenaga menggunakan international financing, sehingga harus comply dengan international standard
- Lama proyeknya adalah 5 tahun selama pembangunan PLTU, ditambah 25 tahun selama PLTU beroperasi.
- Kegiatan yang dilakukan tidak hanya pembibitan, tetapi juga perawatan dan monitoring. Sehingga jika ada karang yang rusak harus diganti.
- Lokasi Pulau Tinda dipilih karena berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh konsultan internal, merupakan lokasi dengan luas yang paing sesuai dengan kebutuhan PT. Indo Raya Tenaga.
- Tantangan Pulau Tunda saat ini belum ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Sementara proses dari pengusulan, pencadangan sampai dengan penetapan kawasan konservasi memakan waktu yang tidak sebentar.



Gambar 2.4 Diskusi dengan perwakilan PT. Indo Raya Tenaga

2.5 Undangan KKP: Rapat Penyusunan Dokumen Readiness Criteria INSAN TERANG LAUTRA

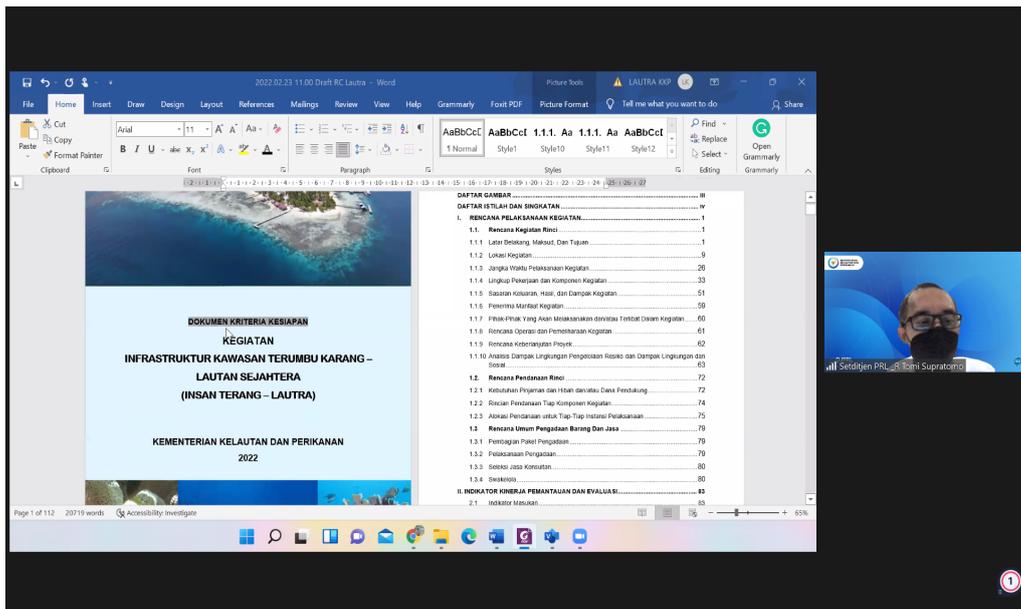
Pada tanggal 8-11 Februari 2022, ICCTF mengikuti rangkaian kegiatan penyusunan dokumen Readiness Criteria (RC) INSAN TERANG LAUTRA. Poin-poin utama dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Hasil dari blue book sudah diumumkan sebesar US\$ 262 Juta, terdiri dari loan dan hibah
- Setelah blue book, dokumen RC ini diperlukan untuk kebutuhan green book
- Dokumen RC yang disusun saat ini tidak dimulai dari nol karena sebelumnya sudah pernah disiapkan dan sudah ada ketentuan bakunya dari Bappenas
- Kriteria yang perlu disiapkan dalam RC ini ada 4, yaitu: rencana pelaksanaan kegiatan; indikator kinerja dan evaluasi; organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan; dan rencana pengadaan tanah
- RC semoga dapat diselesaikan Feb. dan disampaikan ke Bappenas pada akhir Feb melalui Biro Perencanaan. Akan dievaluasi sebelum 4 Maret 2022
- Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kawasan konservasi melalui penyediaan sarana prasarana manajemen, perbaikan lingkungan pemukiman pesisir dan peningkatan sosial ekonomi
- Project ini akan mengcover 16 Provinsi, 12 Kawasan Konservasi Nasional/Daerah dan 4 WPPNRI (713, 714, 715 dan 718)
- Komponen 1 (satu) mengenai Infrastruktur Pengelolaan Terumbu Karang dan Kawasan Pesisir. Sub komponennya ada dua: Penguatan Infrastruktur Konservasi; dan Penguatan Infrastruktur Perikanan
- Komponen 2 (dua) mengenai Infrastruktur Penguatan Ekonomi Masyarakat. Sub komponennya ada tiga: Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan dan Keuangan; Penguatan Pemanfaatan Ekonomi Berkelanjutan Kawasan Konservasi; dan Kampung Nelayan Maju
- Komponen 3 (tiga) adalah Pengelolaan Proyek, Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan Berkelanjutan. Sub komponennya juga ada tiga: Mekanisme Pendanaan Inovatif untuk Program-Program Pelestarian Terumbu Karang dan Konservasi Laut (Blue Finance); Pengembangan Kapasitas; dan Manajemen Proyek
- Terkait Blue Finance di dalam LAUTRA, project digestnya antara lain output berupa dua mekanisme pendanaan inovatif; durasi 3 tahun; target location di DKI Jakarta untuk pengembangan IPBB dan di Gorontalo, NTB dan NTT untuk pilot projectnya.



Gambar 2.5.1 Diskusi penyusunan dokumen RC INSAN TERANG LAUTRA

Pertemuan selanjutnya dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022, ICCTF menghadiri rapat tindak lanjut untuk mereview draft Readiness Criteria yang telah mendapatkan masukan dari pertemuan sebelumnya. Dalam dokumen ini juga sudah ditambahkan masukan terbaru dari ICCTF dan DJPT. Terkait blue finance, sebagai tindak lanjut ICCTF akan mengirimkan definisi blue finance, blue economy dan blue project untuk dimasukkan kedalam daftar istilah. Kemudian terkait pelarangan pemakaian kata beasiswa, maka kalimat pada proposal akan diubah menjadi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk pengelolaan kawasan konservasi, perikanan berkelanjutan dan pendanaan biru. Draft yang telah direview ini selanjutnya akan diperbaiki dan dikirimkan kembali sebagai draft final.

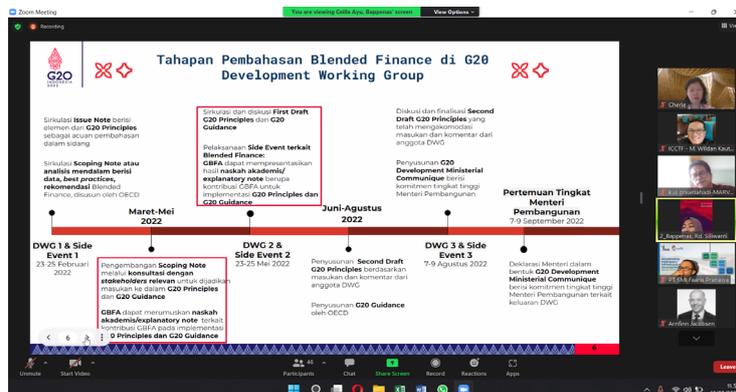


Gambar 2.5.2 Penjelasan dokumen oleh KKP

2.6 Undangan Kemenkomarves: Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Global Blended Finance Alliance dan Climate Action Initiative

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah penjelasan payung hukum Global Blended Finance Alliance dan momentumnya dalam G-20. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- GBFA adalah sebuah konsep untuk mendukung upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Payung hukumnya adalah PERPRES nomor 30 Tahun 2019 tentang keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.
- Ruang lingkupnya meliputi capacity building, policy research, dan secara platform dapat mempertemukan publik dan privat dalam poryek-proyek ramah lingkungan.
- Permodalannya bersumber dari negara anggota, dan memiliki fitur sponsor, misalnya dari Multilateral Development Finance Institutions (MDFI)
- GBFA juga memiliki subsidiary untuk NCCC dan salah satunya terkait dengan pembentukan karbon market. Namun akan dibahas dalam kesempatan berikutnya.
- Indonesia adalah founding members GBFA, namun dan dapat mengajak negara lain yang berminat sebagai bagian dari founding members. Saat ini salah satu yang potensial adalah Singapura.
- Negara Anggota wajib menyumbang USD 12 juta (untuk negara maju) dan USD 6 juta (negara berkembang). Negara-negara Anggota memiliki hak suara yang sama (satu negara satu suara).
- G-20 adalah momentum bagi GBFA untuk declaration approach
- Blended finance diharapkan dapat mendampingi negara-negara berkembang agar menstimulasi private sector untuk datang
- Ada dua isu penting terkait blended finance:
 1. Indonesia belum bisa mengakses pledge yang tersedia. Sejauh ini kita baru bisa mengakses sekitar 16%
 2. Private sector saat ini kontribusinya masih sangat sedikit pada social sector yang less benefit.

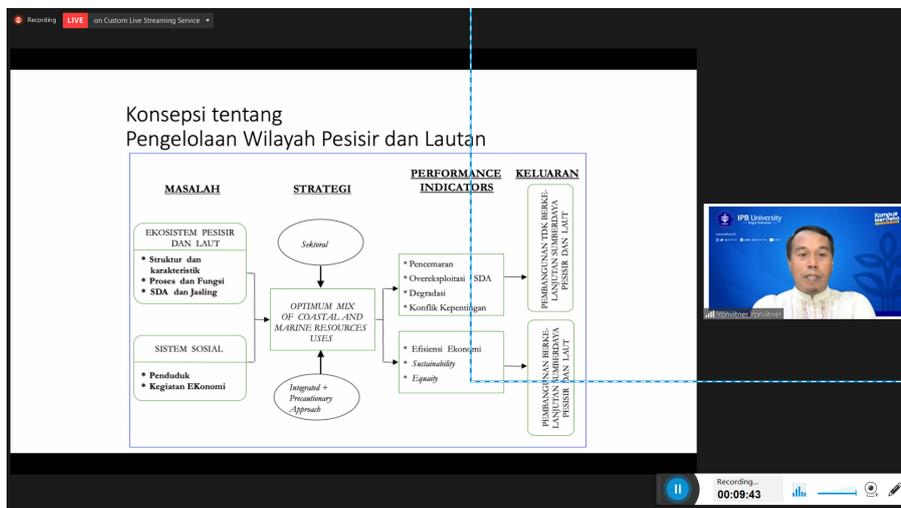


Gambar 2.6 Pemaparan timeline pembahasan Blended Finance menuju G-20

2.7 Undangan Forest Watch Indonesia: Diskusi Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Skema IKN

Pada tanggal 18 Februari 2022, ICCTF menghadiri undangan diskusi Forest Watch Indonesia dengan tema Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Pesisir dari IKN diharapkan mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balikpapan, tidak hanya di pesisir Kutai Kartanegara saja. Dikhawatirkan jika tidak mencakup keseluruhan akan muncul isu sosial ekonomi dan tumpang tindih wilayah penangkapan di wilayah pesisir nantinya.
- Salah satu isu yang juga menjadi sorotan adalah Teluk Balikpapan.
- Teluk Balikpapan memiliki lokasi sangat strategis sehingga dibuat menjadi jalur pelabuhan sementara pembangunan IKN. Namun kegiatan tersebut mulai berdampak kepada ekosistem dan nelayan sekitar.
- Balikpapan juga memiliki spesies yang dilindungi seperti Pesut, namun wilayahnya masih belum menjadi wilayah yang dilindungi dan masih termasuk wilayah budidaya.
- Oleh karena itu, perlu dibuat Lembaga pemerintah untuk mengelola Teluk Balikpapan dan partisipasi dari masyarakat dan tenaga Profesional. Selain itu kawasan mangrove dan padang lamun yang ada di pesisir IKN perlu dimasukkan kedalam kawasan yang dilindungi.

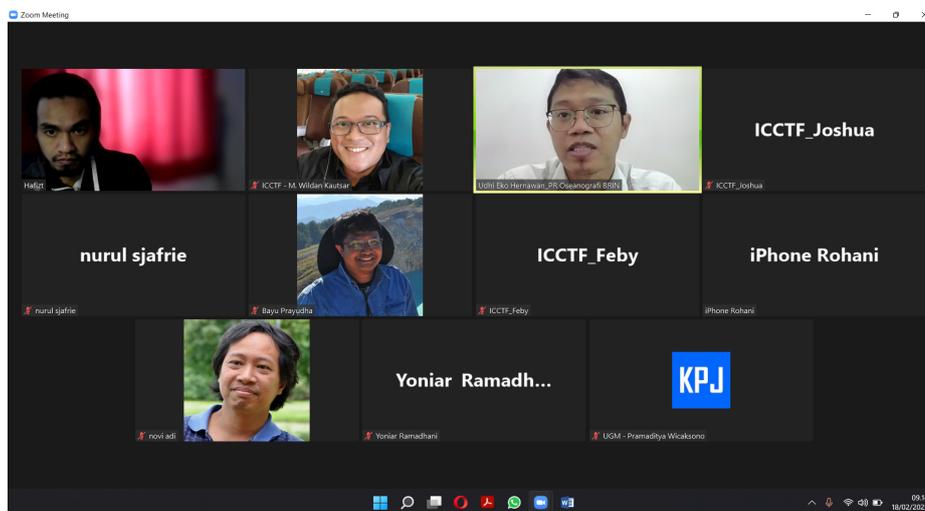


Gambar 2.7 Penyampaian paparan oleh narasumber

2.8 Undangan BRIN: Rapat Koordinasi Proposal Rencana Pemetaan Lamun di Indonesia

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2022, secara online melalui aplikasi Zoom. Agenda kegiatan pada pertemuan ini adalah pembahasan rencana penyusunan proposal untuk pemetaan lamun di Indonesia yang akan dibiayai oleh Packard Foundation. Hasil dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Packard menyampaikan invitation untuk mengirimkan proposal pre-implementation project/ persiapan sebelum pelaksanaan project untuk pemetaan lamun di Indonesia dalam rangka one map policy.
- Secara substansi, pemetaan padang lamun tidak semaju mangrove. Maka perlu dibuat grand design untuk metode dan frameworknya.
- Packard menginginkan yang mengusulkan proposal harus universitas atau NGO, tapi menggandeng BRIN. Didalam diskusi ini ada UNHAS atau UGM.
- Berdasarkan hasil diskusi bersama, UGM akan menjadi pihak yang lead proposal ini kepada Packard. Dekan dari UGM juga sudah pernah menyampaikan kesediannya untuk pembentukan sekretariat.
- Akan dibuat WA group untuk diskusi terkait penyusunan proposal ini.



Gambar 2.8 Pengantar rencana penyusunan proposal oleh BRIN

2.9 Wrap Up Meeting CPRR

Pada tanggal 2 Maret 2022, ICCTF menghadiri undangan Wrap Up Meeting CPRR secara online melalui aplikasi zoom. Hasil dari pertemuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Project implementation guidelines belum semua dipahami dengan tepat. Perlu dihindari perubahan/ perpanjangan implementasi project, force majeure masih dapat ditoleransi
- WB akan memfasilitasi capacity building yang sejalan dengan PMU/PIU, Executing Agency mengalokasikan budget dan penugasan tim
- National Learning Center (NLC) akan menyusun konsep bisnis
- Training STEP akan dilaksanakan sebelum advance procurement, difasilitasi WB. Support LKPP adalah meyakinkan dengan aturan Perpres
- Terkait isu budget allocation gap antara AWP dan DIPA, EA dan tim yg bertugas harus mempercepat formulasi AWP (DJJPR: AWP adlh dokumen yg wajib disubmit pada Trilateral Meeting pada bulan Juli, EA akan revisi POM, Bappenas, Kemenkeu, dan WB akan revisi IPF Implementation Guideline
- BAST merupakan isu financial management, namun di bank executed trust fund project juga merupakan isu harmonisasi sistem dan regulasi.
- Perlu instrument monitoring dan evaluasi ke depannya untuk meningkatkan portfolio performance WB
- Masukan-masukan akan ditindaklanjuti WB
- Dokumen action plan akan segera mungkin diperbaiki dan di-share



Gambar 2.9 Pemaparan oleh Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral

2.10 Undangan Rapat dengan CoWater Conculting

Pada tanggal 17 Maret 2022, ICCTF melaksanakan pertemuan secara online melalui aplikasi zoom dengan CoWater Conculting. Dalam pertemuan ini CoWater ingin mengetahui lebih jauh mengenai ICCTF dan bagaimana pendekatan proses yang dilakukan dalam mengelola hibah. Selain itu, CoWater juga ingin berdiskusi mengenai carbon market. Hasil dari pertemuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- CoWater perlu berkerja dengan Bappeda. Tempat terbaik untuk memulai adalah Bappeda dan lembaga-lembaga yang berada di level Provinsi.
- Program mungkin dapat dimulai pada bulan september atau oktober
- CoWater disarankan juga perlu berdiskusi dengan Direktorat atau Kementerian lainnya
- CoWater ingin mengetahui proyek-proyek mitigasi yang telah dilakukan oleh ICCTF sebelumnya
- ICCTF akan mengirimkan selection process pada credential ICCTF kepada CoWater

3 | Komunikasi, Outreach dan Kemitraan

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas. Pada tahun 2021 hingga di tahun 2022 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan seluruh staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun solidaritas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program - program ICCTF. Selain itu juga menyebarkan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum tidak hanya dalam bentuk sosialisasi dan ekspose program - program ICCTF, tetapi juga dalam bentuk kunjungan ke lokasi program, pameran dan seminar, optimalisasi sosial media dan website ICCTF, serta peningkatan relasi dengan media melalui kegiatan *press conference*. Komunikasi lebih fokus pada komunikasi eksternal melalui penyelenggaraan kegiatan kick-off, seminar publik, serta pelatihan dan juga *Exit Strategi*.

3.1 Media Sosial

Pada triwulan pertama 2022 ini, ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (<https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund>); Twitter (@ICCTF_ID); Instagram (@icctfofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto - foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para

mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan pertama terangkum pada Gambar dan Tabel di bawah. Adapun laporan *organic traffic* dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.



Gambar 3.1.1 Infografis Perkembangan Akun Sosial Media ICCTF: Facebook, Twitter dan Instagram pada kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.



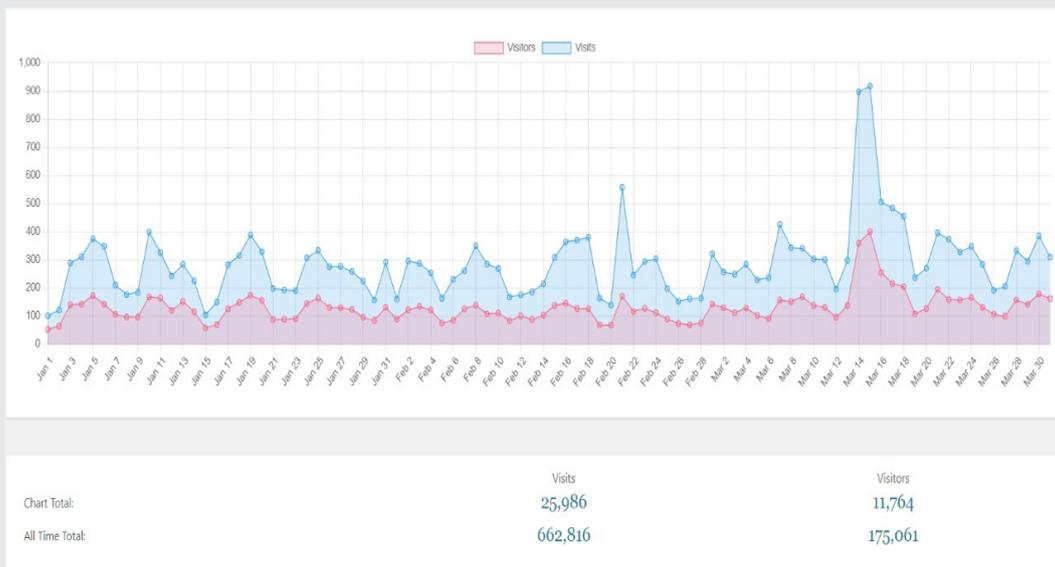
Gambar 3.1.2 Homepage Website ICCTF “Podcast Cerita dari Laut” pada Kuartal 1 (Bulan Januari) Tahun 2022.



Gambar 3.1.3 Pop-up Memperingati Isra Mi'raj dalam Website ICCTF pada Kuartal 1 (Bulan Februari) Tahun 2022.



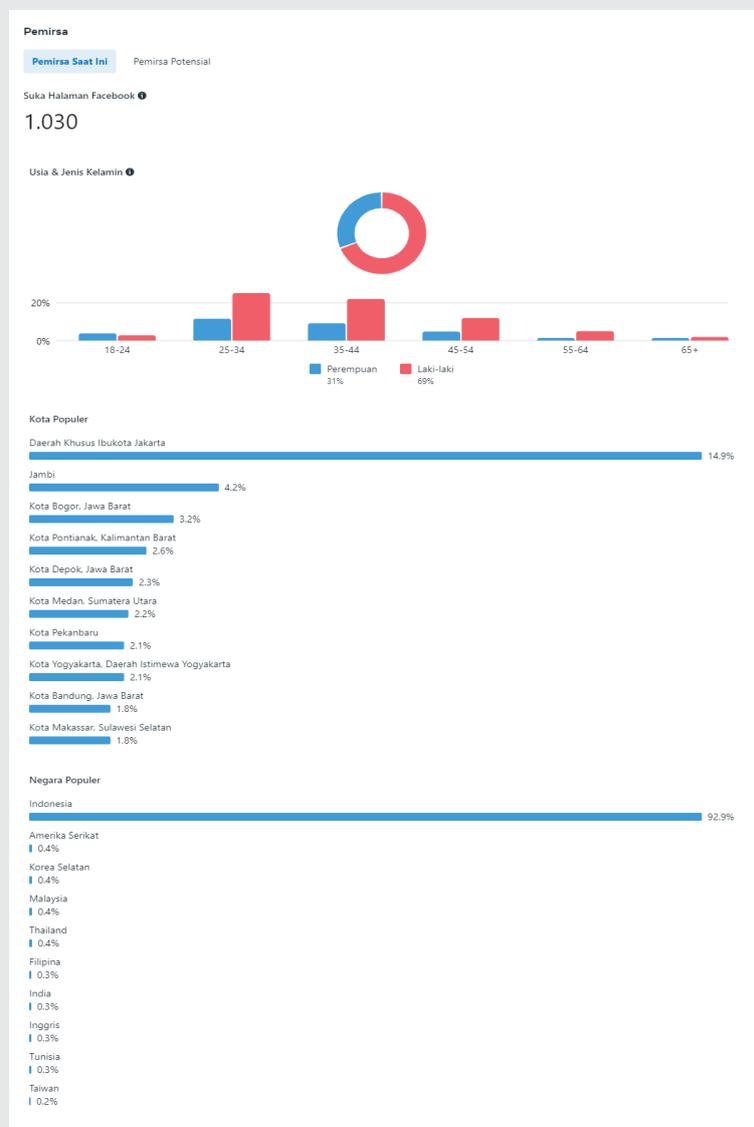
Gambar 3.1.4 Pop-up Memperingati Hari Suci Nyepi dalam Website ICCTF pada Kuartal 1 (Bulan Maret) Tahun 2022.



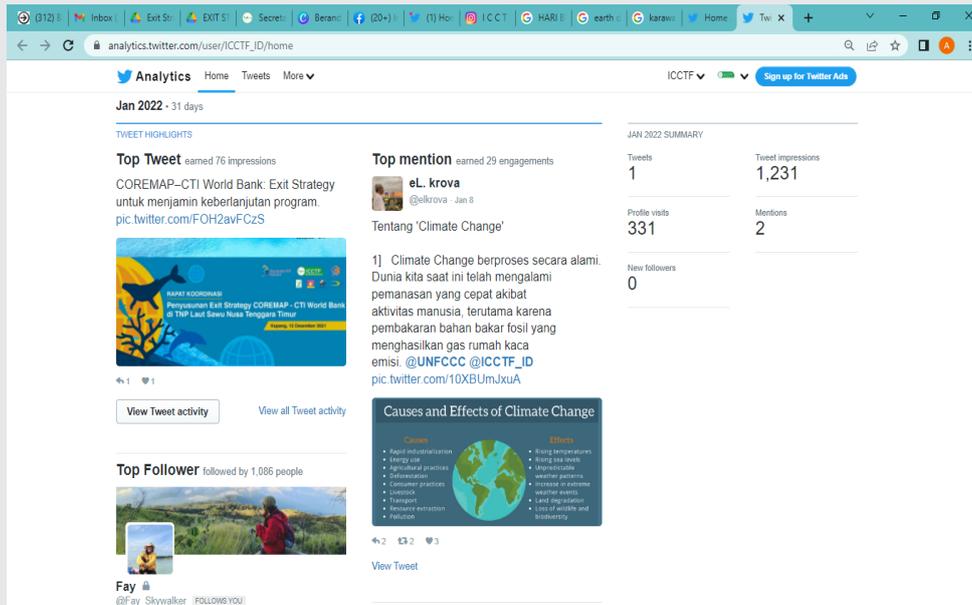
Gambar 3.1.5 Hasil Jangkauan Visit & Visitor Website ICCTF kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.



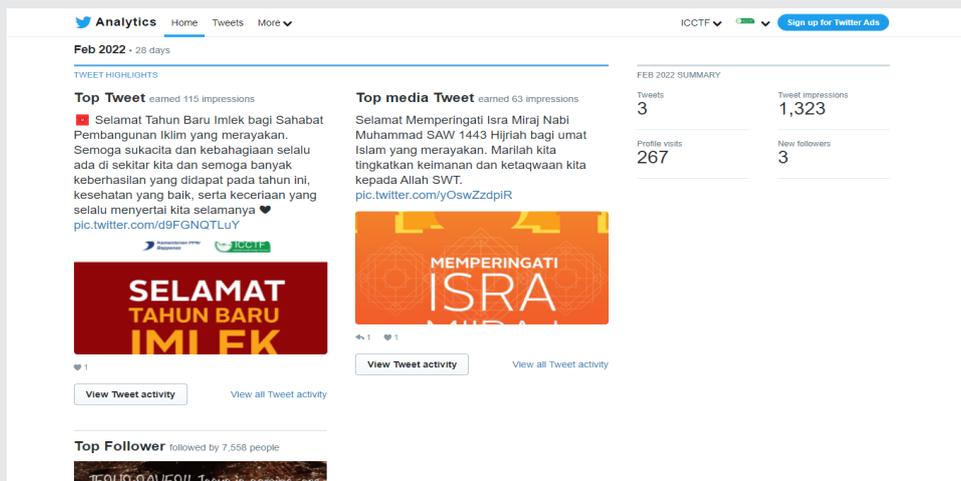
Gambar 3.1.6 Hasil Jangkauan Postingan Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.



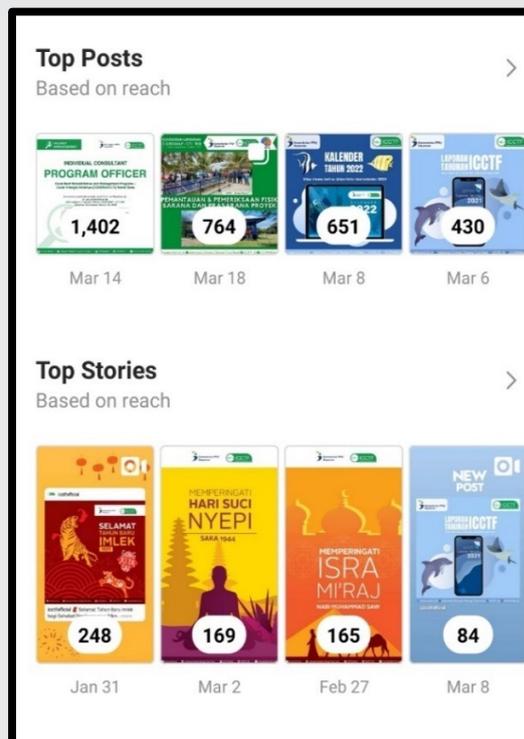
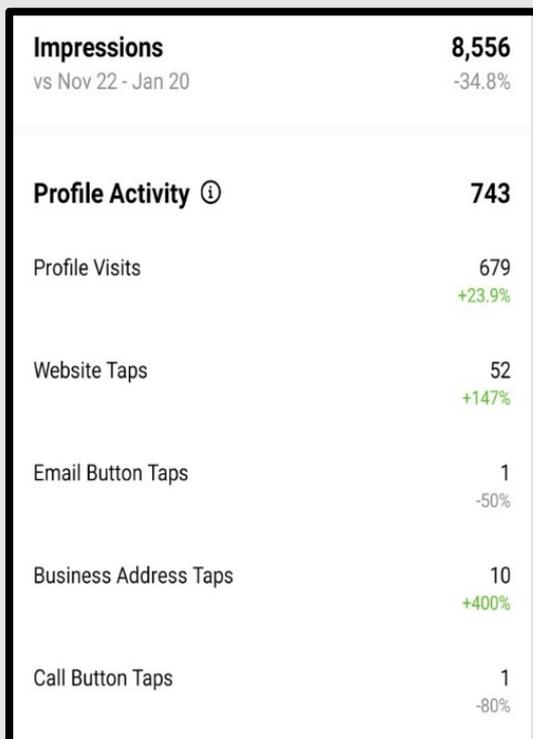
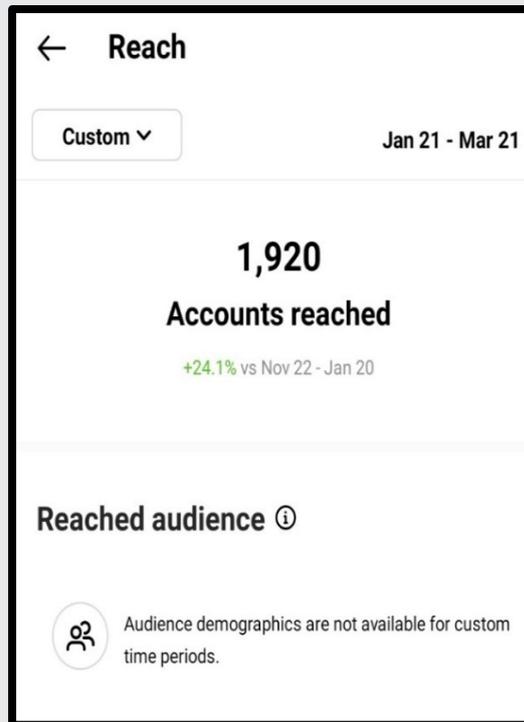
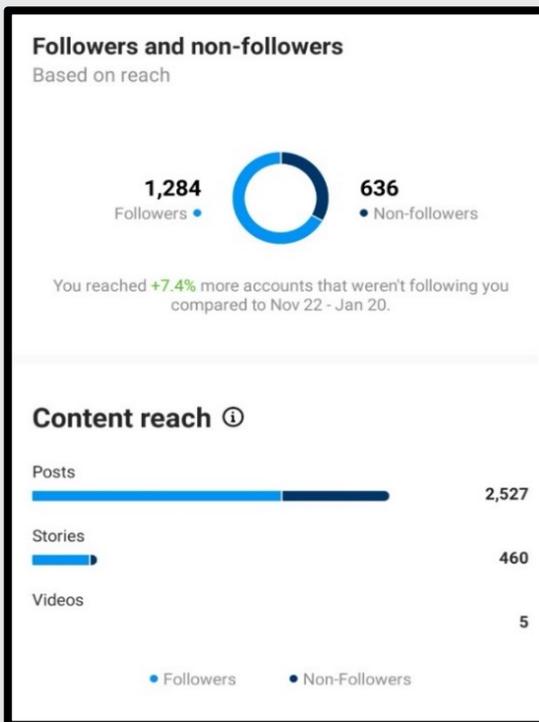
Gambar 3.1.7 Hasil Jangkauan Pemirsa Suka Halaman Facebook Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.



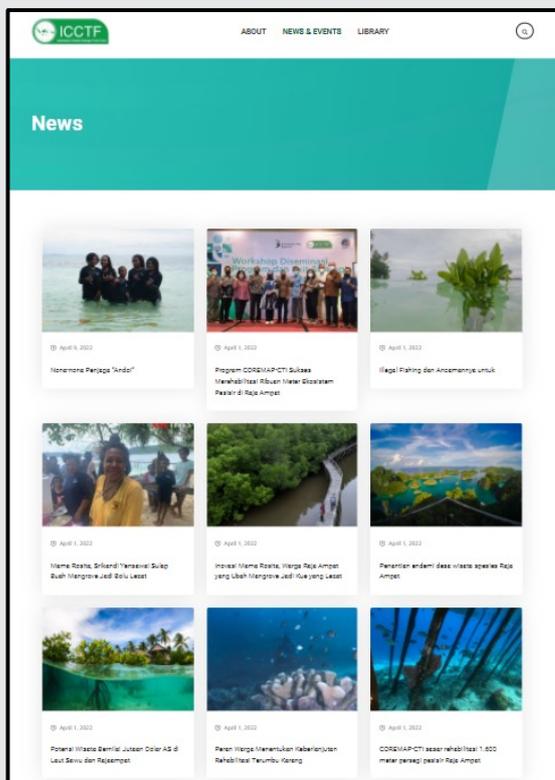
Gambar 3.1.8 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 1 (Bulan Januari) Tahun 2022.



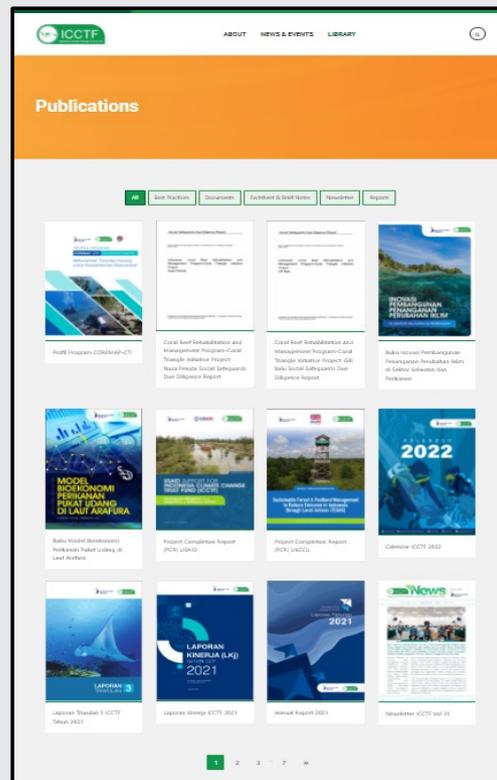
Gambar 3.1.9 Hasil Jangkauan Halaman Twitter Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 1 (Bulan Februari) Tahun 2022.



Gambar 3.1.10 Hasil Jangkauan Halaman Instagram Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.



Gambar 3.1.11 Tampilan pada halaman News dan Artikel pada Website Akun Indonesia Climate Change Trust Fund pada Kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.



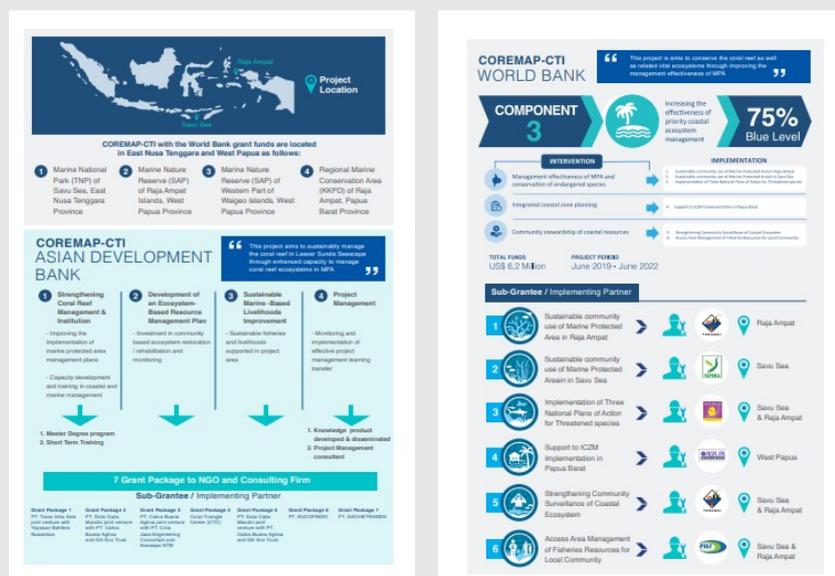
Gambar 3.12. Tampilan pada halaman Publikasi yang telah tayang di ICCTF News pada Kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.

3.2 Produksi Media Publikasi

Pada Kuartal 1 2022 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP–CTI melakukan produksi media baik secara digital dalam bentuk cetak, visual, serta audio. Produksi media secara digital untuk mendukung kegiatan sekretariat seperti booklet Profil COREMAP-CTI, Factsheet COREMAP-CTI World Bank dan Asian Development Bank termasuk dengan menyelesaikan layout dan publikasi Design Sosial Media Content Kuartal 1 Tahun 2022 yang dapat dilihat pada gambar 3.2.1, 3.2.2 dan juga Booklet Program COREMAP-CTI WB Tahun 2022 pada gambar 3.2.3.



Gambar 3.2.1 Tampilan Produksi Booklet COREMAP-CTI World Bank Tahun 2022.



Gambar 3.2.2 Tampilan Produksi Booklet COREMAP-CTI English Version Tahun 2022.



Gambar 3.2.3 Tampilan Produksi Buku Panduan Kegiatan Pemeriksaan Aset, Ekspose dan Media Visit COREMAP-CTI World Bank Kementerian PPN/ Bappenas di Raja Ampat, Papua Barat Tahun 2022.



Gambar 3.2.4 Tampilan Produksi Laporan Tahunan ICCTF Tahun 2021



Gambar 3.2.5 Tampilan Produksi Laporan Kinerja Satuan Kerja ICCTF Tahun 2021.



Gambar 3.2.6 Tampilan Desain Layout dan Publikasi Sosial Media Content Kuartal 1 (Bulan Januari, Februari dan Maret) Tahun 2022.

3.3 Media Monitoring

Pada Kuartal 1 2022 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa baik cetak maupun online. Pada bulan Maret ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya Exit Strategi COREMAP-CTI World Bank di Raja Ampat, Papua Barat.

Tabel 3.3.1 Daftar Publikasi Berita kegiatan Exit Strategi & Media Visit COREMAP-CTI World Bank Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat.

NO	MEDIA	TANGGAL TERBIT	JUDUL BERITA	LINK PUBLIKASI
1.	Antara News	23-Mar-22	Pengaruh Raja Ampat Di Episentrum Segitiga Terumbu Karang Dunia.	https://www.antaraneews.com/berita/2777481/pengaruh-raja-ampat-di-episentrum-segitiga-terumbu-karang-dunia
2.	Beritapedia	23-Mar-22	Pengaruh Raja Ampat Di Episentrum Segitiga Terumbu Karang Dunia	https://beritapedia.my.id/pengaruh-raja-ampat-di-episentrum-segitiga-terumbu-karang-dunia.html
3.	Beritapedia	23-Mar-22	Terumbu Karang Rusak Oleh Kapal Pinisi Raja Ampat Berperan Vital di Episentrum Segitiga	https://www.indozone.id/travel/6gs9A4q/terumbu-karang-rusak-oleh-kapal-pinisi-raja-ampat-berperan-vital-di-episentrum-segitiga
4.	Antara News	24-Mar-22	Coremap CTI Sasar Rehabilitasi 1600 Meter Persegi Pesisir Raja Ampat.	https://www.antaraneews.com/berita/2778897/coremap-cti-sasar-rehabilitasi-1600-meter-persegi-pesisir-raja-ampat
5.	Kumparan.com	24-Mar-22	Menjaga Potensi Laut di Raja Ampat, ICCTF Bangun Kesadaran Ekologi dan Ekonomi.	https://kumparan.com/kumparannews/menjaga-potensi-laut-di-raja-ampat-icctf-bangun-kesadaran-ekologi-dan-ekonomi-1xkS71VYmW4
6.	Kumparan.com	24-Mar-22	Kerja Sama Masyarakat dan Pelaku Wisata Tindak Pemancing Ilegal di Raja Ampat.	https://kumparan.com/kumparannews/kerja-sama-masyarakat-dan-pelaku-wisata-tindak-pemancing-ilegal-di-raja-ampat-1xkSU8vEeKb
7.	Idntimes	24-Mar-22	Lewat Coremap-CTI, 1600 m eksosistem pesisir prioritas Raja Ampat Terehabilitasi.	https://www.idntimes.com/news/indonesia/hana-adi-perdana-1/lewat-coremap-cti-1600-meter-ekosistem-pesisir-prioritas-raja-ampat-terehabilitasi
8.	TheIndonesia.suara.com	24-Mar-22	1600 m2 of Raja Ampats Coral Reef Mangroove Rehabilitated in ICCTF Progreem.	https://theindonesia.suara.com/news/2022/03/24/123029/1600m2-of-raja-ampats-coral-reef-mangrove-rehabilitated-in-icctf-program

9.	Indonesiatoday.co.id	24-Mar-22	Menjaga Potensi Laut di Raja Ampat, ICCTF Bangun Kesadaran Ekologi dan Ekonomi.	https://indonesiatoday.co.id/read/menjaga-potensi-laut-di-raja-ampat-icctf-bangun-kesadaran-ekologi-dan-ekonomi-553889
10.	Siapgrak.com	24-Mar-22	COREMAP-CTI sasar rehabilitasi 1.600 meter persegi pesisir Raja Ampat.	https://siapgrak.com/artikel/EX3kGKR
11.	Kompas.id (juga terbit cetak)	25-Mar-22	Peran Masyarakat Menentukan Keberlanjutan Rehabilitasi Terumbu Karang.	https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/25/peran-masyarakat-menentukan-keberlanjutan-rehabilitasi-terumbu-karang
12.	Kumparan.com	25-Mar-22	Cerita Mama Ani Lestarikan Laut Raja Ampat dengan Rehabilitasi Lamun.	https://kumparan.com/kumparannews/cerita-mama-ani-lestarikan-laut-raja-ampat-dengan-rehabilitasi-lamun-1xksTleTa0b
13.	Kumparan.com	25-Mar-22	Inovasi Mama Rosita, Warga Raja Ampat yang Ubah Mangrove Jadi Kue yang Lezat.	https://kumparan.com/kumparannews/inovasi-mama-rosita-warga-raja-ampat-yang-ubah-mangrove-jadi-kue-yang-lezat-1xkswMoau4Y
14.	Infopublik.com	25-Mar-22	Program Coremap CTI Sukses Merehabilitas Ribuan meter Ekosistem Pesisir Di Raja Ampat.	https://infopublik.id/kategori/nusantara/618810/program-coremap-cti-sukses-merehabilitasi-ribuan-meter-ekosistem-pesisir-di-raja-ampat
15.	Sorong News	25-Mar-22	35 Ekor Pari Manta Terdeteksi Penghuni Baru Pulau Raja Ampat	https://sorongnews.com/35-ekor-pari-manta-terdeteksi-menjadi-penghuni-baru-pulau-raja-ampat/
16.	West Papua Daily	25-Mar-22	ICCTF Builds Ecological and Economic Awareness in Raja Ampat West Papua	https://westpapudaily.com/icctf-builds-ecological-and-economic-awareness-in-raja-ampat-west-papua.html
17.	Kumparan.com	26-Mar-22	Illegal Fishing dan Ancamannya untuk Pariwisata di Raja Ampat.	https://kumparan.com/kumparannews/illegal-fishing-dan-ancamannya-untuk-pariwisata-di-raja-ampat-1xkzxOAZw97

18.	Idntimes	26-Mar-22	Mama Rosira Srikandi Yensawai Sulap Buah Mangroove jadi Bolu Lezat.	https://www.idntimes.com/news/indonesia/hana-adi-perdana-1/mama-rosita-srikandi-yensawai-sulap-buah-mangrove-jadi-bolu-lezat
19.	Idntimes	26-Mar-22	Kisah Konstantinus Saleo Sang Aquaman Dari Raja Ampat	https://www.idntimes.com/news/indonesia/hana-adi-perdana-1/kisah-konstantinus-saleo-sang-aquaman-dari-raja-ampat
20.	Antara News	27-Mar-22	Penantian Endemi Desa Wisata Spesies Raja Ampat.	https://www.antaraneews.com/berita/2784673/penantian-endemi-desa-wisata-spesies-raja-ampat
21.	Dailyklik.id	27-Mar-22	Menikmati Keindahan Desa Wisata Spesies Empat Papua Barat	https://www.dailyklik.id/2022/03/27/menikmati-keindahan-desa-wisata-spesies-raja-ampat-papua-barat/3/
22.	Sorong News	27-Mar-22	Perempuan Tangguh Pelestari Lamun Kampung Yensawai Timur Raja Ampat	https://sorongnews.com/perempuan-tangguh-pelestari-lamun-kampung-yensawai-timur-raja-ampat/
23.	National Geographic.com	27-Mar-22	Potensi Wisata bernilai jutaan dolar AS di laut Sawu dan Raja Ampat.	https://nationalgeographic.grid.id/read/133198149/potensi-wisata-bernilai-jutaan-dolar-as-di-laut-sawu-dan-rajaampat
24.	National Geographic.com	31-Mar-22	Ketika Sains dan Kearifan Lokal Rajaampat Berpadu untuk Konservasi.	https://nationalgeographic.grid.id/read/133205845/ketika-sains-dan-kearifan-lokal-rajaampat-berpadu-untuk-konservasi



3

AUDIT, KEUANGAN Dan OPERASIONAL

1. Laporan Audit Tahun 2022

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2022 ini BPK sedang mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2021 dan opini masih belum difinalkan. Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2021 juga sedang diaudit oleh BPK Audit Khusus di tahun 2022 ini.

2. Informasi Keuangan Periode Januari-Maret 2022

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2022 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 12M dengan self-blocking sebesar 876juta dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 67,57M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2022 adalah 79,57M. Capaian pada kuartal 1 tahun 2022 adalah sebesar 16,83M yaitu 21,15% dari total dana yang dikelola.

Tabel Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Maret tahun 2022

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan	Sisa Anggaran	
APBN - ICCTF	12.000.000.000	1.045.893.832	9%	10.954.106.168
Hibah – WorldBank (Reksus)	19.827.109.000	12.829.355.624	65%	6.997.753.376
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	47.746.039.000	2.955.313.486	6%	44.790.725.514
TOTAL	79.573.148.000	16.830.562.942	21%	62.742.585.058

3. Operasional / Kesekretariatan

Sampai pada Triwulan 1, jumlah tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF berjumlah 26 Orang yang terdiri dari 14 konsultan dengan penugasan time base, 2 konsultan output base, 1 konsultan intermittent dan 10 tenaga jasa lainnya. Penyebaran gender terdiri dari 18 jenis kelamin laki-laki dan 9 jenis kelamin perempuan sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Febuanty Suyatiningsih	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
7	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Hans Budiarto I	Program Assistant	Rupiah Murni (APBN)
9	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Deta Kurnia Soundra	IT Officer	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
13	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
14	Muhamad Nuryanto	Database Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
16	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)
17	Budiyanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
18	Steven R. Limbong	Program Officer COREMAP-CTI WB	Hibah LN WB
19	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
20	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
21	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
22	Dimas Darmawan	Procurement Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Agus Salim	Site Coordinator Gili Matra	Hibah LN ADB
24	Lalu Alid Riadi	Site Coordinator Gili Balu	Hibah LN ADB
25	I Gede Wahyu Sena W	Site Coordinator Nusa Penida	Hibah LN ADB
23	Derick Prawira	Creative Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

LAPORAN 1 TRIWULAN 2022

